

**DIPLOMASI WARISAN BUDAYA TURKI PADA ERA ERDOGAN:
TRANSFORMASI AYASOFYA DAN KARIYE (2020)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Moh Fairus Abadis Marwi

21323147

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**DIPLOMASI WARISAN BUDAYA TURKI PADA ERA ERDOGAN:
TRANSFORMASI AYASOFYA DAN KARIYE (2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Moh Fairus Abadis Marwi

21323147

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
DIPLOMASI WARISAN BUDAYA TURKI PADA ERA ERDOGAN:
TRANSFORMASI AYASOFYA DAN KARIYE (2020)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.
3. Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written on a horizontal line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the largest and most prominent, followed by the second and then the third.

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

15 Agustus 2025



Moh Fairus Abadis Marwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	17
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	17
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	18
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	18
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB 2 ANALISIS AYASOFYA DAN KARIYE SEBAGAI <i>CARRIER</i>	
UNTUK IDENTITAS NASIONAL	20
2.1 Konsep <i>Carrier</i> dalam <i>Heritage diplomacy</i>	22
2.2 Proses Transformasi Ayasofya dan Kariye	25

2.2.1 <i>Ayasofya</i>	26
2.2.2 <i>Kariye</i>	27
2.3 Ayasofya dan Kariye sebagai <i>Carrier Diplomatic Relations</i>	28
BAB 3 ANALISIS AYASOFYA DAN KARIYE SEBAGAI <i>COMMON HERITAGE</i> DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK	32
3.1 Konsep <i>Common</i> dalam <i>Heritage Diplomacy</i>	35
3.1.1 <i>Shared Heritage</i>	36
3.2 Respon International Terhadap Transformasi	38
3.2.1 <i>Reaksi Negara-Negara Barat</i>	41
3.2.2 <i>Respon UNESCO</i>	42
3.2.3 <i>Reaksi dari Gereja Ortodoks dan Vatikan</i>	43
3.2.4 <i>Sikap Negara-Negara Muslim</i>	43
3.3 Aktor dan Implikasi	44
3.3.1 <i>Actor</i>	44
3.3.2 <i>Concreate Goal</i>	46
3.3.3 <i>General Goal</i>	48
3.4 Ayasofya dan Kariye sebagai <i>Heritage as Diplomacy</i>	49
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi berbagai penggunaan *Heritage in Cultural* dan *Heritage Diplomacy*

Tabel 2. Kronologi Transformasi Ayasofya dan Kariye

Tabel 3. Respon Internasional terhadap Transformasi Ayasofya dan Kariye (2020)

Tabel 4. Analisis *Heritage as Diplomacy*: Kasus Ayasofya & Kariye

DAFTAR SINGKATAN

- AKP : Adalet ve Kalkınma Partisi
- OKI : Organisasi Kerjasama Islam
- UNESCO : United Nations Education, Scientific and Cultural Organization

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan diplomasi warisan budaya Turki pada era pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, dengan studi kasus transformasi Museum Ayasofya dan Kariye menjadi masjid pada tahun 2020. Transformasi ini memicu respons global yang mencerminkan ketegangan antara kedaulatan nasional dan komitmen internasional terhadap pelestarian warisan budaya. Menggunakan kerangka teori *heritage diplomacy* yang dikembangkan oleh Tim Winter dan Miloš Todorović, penelitian ini menganalisis bagaimana situs-situs warisan digunakan sebagai instrumen diplomatik untuk memperkuat identitas nasional dan posisi geopolitik Turki. Argumen sementara dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Erdogan bukan hanya bentuk simbolisme religius, melainkan strategi politik luar negeri yang merepresentasikan kekuatan lunak (*soft power*) Turki di dunia Islam. Temuan menunjukkan bahwa transformasi tersebut tidak hanya menjadi instrumen domestik untuk meraih dukungan politik, tetapi juga sarana diplomasi simbolik yang berkontribusi terhadap posisi Turki dalam percaturan global. Penelitian ini menyoroti kompleksitas antara nilai religius, identitas nasional, dan diplomasi budaya dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.

Kata kunci: Diplomasi Warisan Budaya, *Heritage Diplomacy*, Erdogan, Ayasofya, Kariye, Soft Power, Identitas Nasional

ABSTRACT

This research examines Turkey's cultural heritage diplomacy policy under President Recep Tayyip Erdogan, focusing on the 2020 transformation of the Hagia Sophia and Kariye museums into mosques. This shift triggered global responses, reflecting tensions between national sovereignty and international obligations to protect world heritage. Using the theoretical framework of heritage diplomacy developed by Tim Winter and Miloš Todorović, this study analyzes how cultural heritage sites are utilized as diplomatic tools to reinforce Turkey's national identity and geopolitical standing. The preliminary argument suggests that Erdogan's policy is not merely a religious symbolic gesture, but a strategic foreign policy reflecting Turkey's soft power projection within the Islamic world. Findings indicate that the transformation served both as a domestic political instrument and a form of symbolic diplomacy that contributes to Turkey's global positioning. This study highlights the complexities among religious values, national identity, and cultural diplomacy in the dynamics of contemporary international relations.

Keywords: Cultural Heritage Diplomacy, *Heritage Diplomacy*, Erdogan, Hagia Sophia, Kariye, Soft Power, National Identity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ayasofya atau Hagia Sophia yang terletak di Istanbul, Turki, merupakan salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di dunia. Bangunan ini memiliki nilai historis, budaya, dan religius yang sangat penting, baik bagi dunia Kristen maupun Islam. Didirikan pada tahun 537 M oleh Kaisar Bizantium Justinianus I sebagai katedral Ortodoks, Ayasofya berfungsi sebagai pusat keagamaan Bizantium selama lebih dari sembilan abad, hingga akhirnya diubah menjadi masjid setelah penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Transformasi tersebut menjadikan Ayasofya simbol kejayaan Ottoman sekaligus representasi peralihan identitas religius dan politik di kawasan tersebut. Namun, setelah berdirinya Republik Turki pada 1923, Mustafa Kemal Atatürk menetapkan kebijakan sekularisasi yang diwujudkan melalui keputusan menjadikan Ayasofya sebagai museum pada 1935. Keputusan ini dimaksudkan untuk menegaskan arah modernisasi dan sekularisme Turki serta memperlihatkan keterbukaan negara tersebut terhadap peradaban global (Muhammad, Wahyudi, and Nadia 2020, 15).

Selain Ayasofya, bangunan bersejarah lain yang mengalami perjalanan serupa adalah Kariye, yang awalnya berdiri sebagai Gereja Chora pada abad ke-4. Gereja ini dikenal karena keindahan mosaik dan lukisan dinding Bizantinnya. Setelah penaklukan Ottoman, Kariye diubah menjadi masjid pada abad ke-16, kemudian pada 1945 diubah menjadi museum sebagai bagian dari kebijakan

sekularisasi. Namun, pada 2020, pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan menetapkan kembali status Kariye sebagai masjid, mengikuti pola yang sama dengan Ayasofya (Suhartono 2020, 77).

Transformasi status dua bangunan ini pada tahun 2020 menimbulkan kontroversi karena keduanya telah lama menjadi simbol lintas agama, lintas budaya, dan lintas peradaban. Keputusan pemerintah Turki melalui peran Pengadilan Tinggi yang mencabut status museum dianggap sebagai tonggak penting yang mencerminkan arah politik domestik di bawah kepemimpinan Erdoğan. Kebijakan tersebut, di satu sisi, dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan identitas religius Turki serta memperkuat legitimasi politik di tingkat domestik. Namun di sisi lain, Ayasofya dan Kariye merupakan situs yang diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia sejak 1985, sehingga perubahan statusnya memunculkan perdebatan mengenai pelestarian nilai universal dan keotentikan sejarah (Rahmatika, Setiawaty, and Wahyudi 2021, 103).

Kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik domestik Turki. Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dikenal memiliki orientasi politik Islam yang berusaha mengoreksi warisan sekularisme Atatürk. Transformasi Ayasofya dan Kariye menjadi masjid dipandang sebagai wujud dari politik simbolik yang menegaskan identitas Islam dalam kehidupan publik Turki. Bagi sebagian kalangan, langkah ini merupakan penguatan jati diri bangsa sekaligus menghidupkan kembali kejayaan Ottoman sebagai fondasi identitas politik kontemporer. Namun, bagi kelompok yang mendukung warisan sekularisme, keputusan ini justru dipandang sebagai kemunduran dari prinsip modernisasi Turki (Hida 2021, 65).

Lebih jauh, dinamika ini memperlihatkan bagaimana warisan budaya tidak pernah sepenuhnya netral. Bangunan bersejarah, seperti Ayasofya dan Kariye, selalu dimaknai ulang sesuai dengan kebutuhan politik rezim yang berkuasa. Pada masa Bizantium, Ayasofya adalah simbol kekristenan Ortodoks. Pada masa Ottoman, ia beralih menjadi simbol kejayaan Islam. Pada era republik sekuler, ia menjadi lambang keterbukaan modern. Kini, di bawah Erdoğan, Ayasofya kembali dimaknai sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus identitas Islam yang mengakar kuat dalam politik domestik dan diplomasi internasional (Kıran 2020, 211).

Dari perspektif warisan budaya dunia, keputusan tersebut menimbulkan problematika yang lebih luas. Ayasofya dan Kariye tidak hanya memiliki makna lokal atau nasional, tetapi juga nilai universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Sebagai bagian dari Situs Warisan Dunia, keduanya berfungsi sebagai simbol pertemuan antara peradaban Kristen dan Islam. Perubahan status menjadi masjid pada 2020 menantang narasi universalitas ini, karena dikhawatirkan dapat membatasi fungsi inklusif bangunan tersebut. UNESCO sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab terhadap pelestarian warisan budaya dunia menyoroti pentingnya menjaga aksesibilitas dan keberlanjutan pelestarian kedua situs tersebut (Kıran 2020, 213).

Selain itu, perubahan status ini juga memperlihatkan interaksi erat antara politik identitas dengan diplomasi budaya. Kebijakan transformasi Ayasofya dan Kariye tidak hanya berorientasi ke dalam negeri, melainkan juga diarahkan pada pencitraan Turki di kancah internasional. Erdoğan menggunakan kedua situs tersebut untuk menunjukkan bahwa Turki adalah negara berdaulat yang tidak

tunduk pada tekanan eksternal. Dengan demikian, situs warisan budaya dipakai sebagai alat komunikasi politik untuk menegaskan posisi Turki dalam percaturan global. Hal ini menunjukkan bagaimana warisan budaya berfungsi tidak sekadar sebagai peninggalan sejarah, melainkan juga sebagai *carrier* identitas dan legitimasi politik yang dapat dinegosiasikan di panggung internasional (Tyas, Albayumi, and Molasy 2022, 144).

Isu transformasi Ayasofya dan Kariye juga menyoroti ketegangan antara konsep kedaulatan negara dengan prinsip universalitas warisan budaya. Di satu sisi, Turki berhak menentukan fungsi bangunan yang berada dalam wilayahnya. Di sisi lain, pengakuan internasional terhadap situs tersebut sebagai warisan budaya dunia menuntut adanya komitmen menjaga sifat lintas batasnya. Kontradiksi inilah yang menjadikan kebijakan Erdoğan menarik untuk dikaji, karena menyentuh pada persoalan identitas nasional, agama, politik domestik, hingga diplomasi internasional (Mujahidin 2022, 98).

Lebih jauh lagi, fenomena ini memperlihatkan pergeseran paradigma dalam memahami warisan budaya. Selama ini, warisan budaya sering dipandang hanya sebagai objek pelestarian. Namun, kasus Ayasofya dan Kariye menunjukkan bahwa warisan budaya dapat menjadi instrumen politik yang aktif—membentuk narasi identitas, memperkuat legitimasi rezim, dan membangun pengaruh internasional. Dengan demikian, transformasi kedua bangunan ini perlu dibaca sebagai strategi politik yang kompleks, yang tidak hanya mengatur relasi domestik, tetapi juga membangun narasi geopolitik Turki sebagai pewaris kejayaan peradaban Islam (Sujati and Iryana 2020, 56).

Kebijakan transformasi Ayasofya dan Kariye pada 2020 tidak hanya mencerminkan dinamika internal Turki, tetapi juga mengindikasikan adanya penggunaan warisan budaya sebagai instrumen kekuatan lunak (*soft power*). Dengan mengubah status kedua situs, Turki menegaskan identitasnya sebagai negara Muslim yang berdaulat, sekaligus menantang dominasi wacana sekularisme yang diwariskan sejak era awal republik. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa warisan budaya dapat dipolitisasi untuk tujuan domestik sekaligus untuk membangun posisi dalam politik global. Maka dari itu, persoalan ini penting dikaji melalui kerangka diplomasi warisan budaya (*heritage diplomacy*), yang melihat bagaimana situs bersejarah dapat berfungsi sebagai alat negosiasi, identitas, dan legitimasi dalam hubungan internasional (Todorović 2020, 34).

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami dinamika politik dan diplomasi yang melingkupi transformasi Ayasofya dan Kariye pada 2020. Melalui pendekatan diplomasi warisan budaya, kajian ini berupaya menjawab bagaimana kebijakan tersebut digunakan oleh Turki sebagai sarana untuk memperkuat identitas nasional sekaligus menegosiasikan posisinya di tingkat internasional. Dengan demikian, latar belakang ini mengerucut pada perumusan masalah terkait hubungan antara warisan budaya, identitas politik, dan praktik diplomasi dalam konteks kebijakan pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan (Winter and Clarke 2017, 21).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah. “Mengapa Turki mengubah situs warisan Dunia UNESCO Ayasofya dan Kariye dari Museum menjadi Masjid tahun 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Riset penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dinamika perubahan status Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan perubahan status Ayasofya dan Kariye baik dari perspektif politik, agama, maupun sosial-budaya dengan menggunakan pendekatan teori *Heritage Diplomacy* yang dirumuskan T winter dan dielaborasi secara praksis oleh Todorvic (2022).

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mengkaji kebijakan diplomasi warisan budaya (*heritage diplomacy*) yang dijalankan pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, dengan fokus pada transformasi Museum Ayasofya dan Kariye menjadi masjid pada tahun 2020. Periode 2020 dipilih karena menjadi momen krusial ketika keputusan resmi diambil, meskipun diskursus dan kebijakan yang melatarbelakanginya telah berkembang sejak dekade sebelumnya. Dengan membatasi penelitian pada dua situs warisan budaya tersebut, studi ini menyoroti peran simbolis dan historis Ayasofya dan Kariye baik dalam narasi nasional

maupun internasional, sekaligus menggambarkan bagaimana keputusan ini dijadikan alat politik dan diplomasi.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori diplomasi warisan budaya sebagaimana dikemukakan Tim Winter dan dielaborasi oleh Todorovic (2022), yang membedakan konsep *heritage as diplomacy* dan *heritage in diplomacy*. Fokus analisis diarahkan pada dimensi geopolitik dan sosio-kultural, dengan menilai bagaimana transformasi Ayasofya dan Kariye mencerminkan ambisi geopolitik Turki serta memengaruhi persepsi internasional, khususnya di dunia Islam. Namun, penelitian ini tidak membahas aspek ekonomi, teologis, maupun liturgis dari perubahan tersebut, melainkan terbatas pada dimensi kebijakan dan diplomasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang terarah, relevan, dan mendalam mengenai strategi heritage diplomacy Turki di era Erdogan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul "*Cultural Heritage as Status Seeking: The International Politics of Turkey's Restoration Wave*" yang ditulis pada 2021 oleh Lerna K Yanik & Jelena subotic membahas strategi politik Turki dalam menggunakan warisan budaya untuk memperkuat status dan pengaruh internasionalnya. Turki, khususnya di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, memulai gelombang restorasi berbagai situs bersejarah, termasuk monumen Ottoman dan Bizantium. Restorasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat identitas nasional, tetapi juga untuk meningkatkan status diplomatik Turki di mata dunia, terutama di dunia Islam. Penulis menyoroti bagaimana Turki

menggunakan warisan budaya sebagai alat diplomasi dan sarana untuk mencari pengakuan di panggung internasional. Strategi ini mencerminkan keinginan Turki untuk memproyeksikan citra sebagai pemimpin dunia Islam dan sebagai negara yang kuat secara budaya dan politik. Dengan demikian, warisan budaya dijadikan instrumen politik yang sejalan dengan ambisi status internasional Turki (Yanik, 2020).

Dalam jurnal yang berjudul “*The Political Risk of Converting Hagia Sophia Back Into a Mosque In The Year 2020*” yang di tulis pada tahun 2021 oleh Sampson M. Nathanailidis, menjelaskan tentang suatu resiko politik terkait putusan perubahan status Ayasofya kembali menjadi masjid. Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan melalui Dewan Negara Turki mencabut dan membatalkan dekrit perubahan mesjid menjadi museum pada tahun 1934 dan menandatangani perubahan status menjadi mesjid tahun 2020. menjelaskan tentang kondisi Negara Turki meskipun menyatakan diri sebagai Negara Sekuler akan tetapi Turkiye merupakan Negara dengan mayoritas muslim. Oleh karena itu Hagia Sopia itu merupakan suatu simbol budaya sekaligus diplomasi politik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan hanya membahas seputar resiko politik atas keputusan tersebut namun tidak menjelaskan tentang bagaimana Turki membangun sebuah heritage diplomasi dalam isu Ayasofya dan Kariye (Sampson M. Nathanailidis 2021).

Dalam Jurnal yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Erdogan Untuk Mengembalikan Kejayaan Islam Di Turki” yang ditulis pada tahun 2022 oleh Naufal Fasha Fadhilla, menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Erdogan dalam upaya mengembalikan sebuah kejayaan Islam yang yang berada di Turki dengan

dimulai tahun 2014 sejak awal menjabat sebagai Presiden Turki. Dalam aksi politiknya Erdogan mampu memberikan pengaruh terhadap pergeseran sekularisme peninggalan Mustafa Kemal Attaturk. Erdogan memiliki upaya untuk mengembalikan kejayaan Islam di Turki yang mirip dengan masa Kejayaan Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman). Strategi yang dilakukan oleh Erdogan melalui kebijakan-kebijakan dengan nilai keislaman untuk dapat meyakinkan banyak masyarakat Turki tentang dikembalikannya suatu identitas Islam. Erdogan mampu melakukan perubahan di berbagai sektor seperti kebijakan yang mengandung nilai keislaman yang menghasilkan kemajuan bagi Islam di Eropa. Keberhasilan tersebut dari berbagai aspek politik, ekonomi, dan pariwisata serta perlahan mengembalikan pengaruh atas martabat Identitas bangsa Turki. Namun, pada tulisan ini memiliki keterbatasan dalam memberikan penjelasan lebih kritis dan respon dunia internasional. Kemudian dalam tulisan ini Saya mencoba untuk memberikan pemahaman lebih tentang heritage diplomasi yang rumuskan oleh T. Winter dan dielaborasi oleh Todorovic (2022) untuk melihat isu Ayasofya dan Kariye (Fadhila 2022).

Dalam Jurnal yang berjudul “*The Politics of the Transition of the Hagia to a Mosque*” yang ditulis pada tahun 2022 oleh Muhammad Saekul Mujahidin, membahas tentang politik dan transformasi status Ayasofya dan menjelaskan ada permasalahan dari fenomena kebijakan yang dikeluarkan Erdogan. Kemudian menjelaskan bagaimana erdogan sebagai pemimpin tertinggi negara Turki menginginkan adanya perubahan dari berbagai bidang salah satunya nilai-nilai dari Islamisme bangsa Turki kembali jaya seperti mas Utsmaniyyah. Adanya keputusan yang kontroversial atas pembatalan dekrit status Hagia Sophia yang

menjadi Museum. Namun, secara eksplisit meskipun jurnal tersebut membahas atas fenomena Ayasofya akan tetapi memiliki keterbatasan dalam penelitiannya yaitu kurang spesifik menjelaskan tentang respon internasional melihat fenomena yang terjadi melalui kritik ataupun dukungan. Maka dari itu Saya melakukan penelusuran dan tulisan yang menyempurnakan tentang heritage diplomasi Turki dengan isu transformasi Ayasofya dan Kariye menjadi masjid (Mujahidin 2022).

Dalam Jurnal yang berjudul “Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan Dunia 1972” yang ditulis oleh Devina Dewenia Matital dan Dyah Ridhul Airin Daties menjelaskan tentang pendekatan secara metologis yang kuat dengan menggunakan konsep penjelasan secara yuridis. Dalam jurnal tersebut menjelaskan dengan berbagai metode yaitu pendekatan secara undang-undang, konseptual dan juga adanya studi kasus yang terjadi dengan dasar analisis hukum yang mendalam terkait status Ayasofya. Analisis yang mencakup peran UNESCO dalam melindungi situs warisan dunia tersebut dan bagaimana pengalihfungsian Ayasofya itu tidak bertentangan secara hukum atas konvensi warisan dunia 1972. Dalam jurnal tersebut juga terdapat penjelasan bagaimana adanya pro dan kontra secara politis dari luar negeri atas tindakan perubahan status Hagia Sophia yang di lakukan oleh Erdogan. Namun, meskipun secara yuridis jurnal tersebut dapat menjawab rumusan maslaah akan tetapi terbatas hanya dalam kajian analisis konstitusi dan lebih banyak menggunakan pendekatan normatif sehingga memiliki keterbatasan data empiris yang bisa di analisis dari sudut pandang lain. Dan juga dalam tulisan tersebut belum memberikan kajian analisis secara non yuridis. Maka dari itu saya

melakukan pembaharuan dari sudut pandang lain dengan memba landasan teori *Heritage Diplomacy* oleh T. Winter yang di elaborasi oleh Todorovic (2022) melihat isu perubahan status Ayasofya dan Kariye (Daties 2021).

Berdasarkan penelitian yang sudah ada menjadi rujukan bagi penulis untuk lebih melengkapi dalam berupaya menjelaskan tentang isu kembalinya Ayasofya dan Kariye menjadi masjid dan melihat isu tersebut melalui perspektif diplomasi warisan budaya yang dirumuskan oleh T. Winter dan dielaborasi secara praksis oleh Todorovic (2022).

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini mengacu pada teori heritage diplomacy Tim Winter yang dielaborasi oleh Todorović (2022). Transformasi Museum Ayasofya dan Museum Kariye menjadi masjid bukan sekadar kebijakan domestik, tetapi juga memiliki dimensi simbolik dan diplomatik yang penting dalam politik luar negeri Turki. Untuk memahami transformasi ini dalam konteks global, penelitian ini menggunakan pendekatan heritage diplomacy sebagaimana dikembangkan oleh Miloš Todorović (2022), yang menjelaskan bagaimana warisan budaya digunakan oleh negara sebagai instrumen untuk membentuk citra, pengaruh, dan hubungan internasional (Todorović 2022, 849).

Todorović membangun kerangka teoretis dengan merujuk pada konsep yang diajukan oleh Tim Winter (2015), yakni *heritage as diplomacy* dan *heritage in diplomacy*. *Heritage as diplomacy* merujuk pada warisan budaya yang secara aktif digunakan sebagai pembawa pesan atau simbol diplomatik antarnegara. Sementara *heritage in diplomacy* mengacu pada penggunaan warisan budaya

sebagai bagian dari strategi diplomatik yang lebih luas, misalnya bantuan pelestarian kepada negara lain (Winter 2015, 1009–1010; Todorović 2022, 850–851). Kerangka ini sangat berguna dalam menganalisis bagaimana warisan seperti Ayasofya dan Kariye tidak hanya merefleksikan identitas sejarah, tetapi juga menjadi alat komunikasi politik internasional (Todorović 2022, 856–857)."

Tabel 1. Klasifikasi berbagai penggunaan *Heritage in Cultural* dan *Heritage Diplomacy*

Table 1. A classification of the different uses of heritage in cultural and heritage diplomacy.

Classification	Heritage Diplomacy		
	as diplomacy	in diplomacy	Cultural Diplomacy
The role of heritage	Heritage as a carrier of diplomatic relations	Heritage as a tool in diplomatic relations used to accomplish a goal	Heritage as a tool in the promotion of the country's culture
Example	Using your heritage abroad, using shared heritage between nations, etc.	Conservation and restoration of monuments of other countries, helping research the heritage of other countries, etc.	Using heritage as a diplomatic gift, organising exhibitions abroad, etc.
Actor	A country and/or international and intergovernmental organisations		A country
The concrete goal of the country	Promoting cooperation	Various	Promoting that heritage and the country's culture
The general goal of the country		Cultivating soft power	
Source of soft power	Culture, specifically, shared history between countries	Political values	Culture of the country in question

Sumber: (Todorovic, 2022)

Tabel 1 dalam artikel Todorović membagi peran warisan budaya dalam diplomasi menjadi tiga bentuk konseptual utama: (1) *heritage as diplomacy*, yaitu ketika warisan budaya digunakan sebagai pembawa atau media utama hubungan diplomatik antarnegara; (2) *heritage in diplomacy*, yaitu ketika warisan budaya diintegrasikan sebagai alat untuk mencapai tujuan diplomatik tertentu; dan (3) *heritage in cultural diplomacy*, yaitu ketika warisan budaya dimanfaatkan dalam promosi budaya nasional untuk memperkuat citra negara (Todorović 2022, 854).

Misalnya, dalam *heritage as diplomacy*, situs warisan bersama antarnegara dapat digunakan sebagai simbol hubungan sejarah dan kerja sama kontemporer. Dalam *heritage in diplomacy*, negara dapat memberikan bantuan konservasi ke negara lain sebagai bentuk solidaritas budaya. Sedangkan *heritage in cultural diplomacy* mencakup penggunaan warisan sebagai hadiah diplomatik, penyelenggaraan pameran, atau pertukaran budaya. Ketiga bentuk ini berperan penting dalam mengonstruksi narasi nasional dan menciptakan pengaruh global melalui jalur simbolik dan non-koersif (Todorović 2022, 853–855).

Setiap kategori dalam Tabel 1 juga mencerminkan tujuan yang berbeda dalam praktik diplomasi. *Heritage as diplomacy* bertujuan mempromosikan kerja sama dan menunjukkan sejarah bersama, sehingga relevan digunakan oleh negara yang memiliki narasi warisan lintas batas, seperti Turki dengan warisan Utsmaniyah. *Heritage in diplomacy* lebih diarahkan untuk membangun hubungan bilateral melalui bantuan pelestarian, yang menunjukkan nilai-nilai politik dan kemanusiaan suatu negara. Ketiganya berkontribusi dalam pembangunan *soft power* melalui pendekatan yang berbeda: baik dengan menampilkan sejarah bersama, menegaskan nilai-nilai politik, atau menyebarkan budaya nasional. Dalam konteks studi kasus transformasi Ayasofya dan Kariye menjadi masjid, pendekatan *heritage as diplomacy* sangat sesuai karena situs tersebut digunakan sebagai simbol pesan diplomatik mengenai identitas, kedaulatan budaya, dan kontinuitas historis Turki (Todorović 2022, 856–857).

Dalam konteks transformasi Ayasofya dan Kariye, pendekatan *heritage as diplomacy* sangat relevan karena situs-situs ini telah digunakan oleh pemerintah Turki untuk menyampaikan pesan kedaulatan budaya dan keagamaan kepada

komunitas internasional. Todorović menyebut bahwa warisan bersama (*shared heritage*) dapat menjadi medium relasi antarnegara karena ia mewakili nilai-nilai simbolik yang membentuk persepsi global terhadap negara tersebut (Todorović 2022, 850–851). Dengan menjadikan situs warisan global sebagai tempat ibadah, Turki tidak hanya mengubah fungsi spasial, tetapi juga makna politik dan diplomatiknya di panggung dunia. Transformasi situs warisan menjadi masjid juga berkaitan dengan upaya Turki untuk membangun *soft power* melalui nilai-nilai religius dan historis. Mengacu pada Joseph Nye (2004), Todorović menjelaskan bahwa *heritage diplomacy* berkontribusi pada *soft power* dengan cara menunjukkan nilai politik dan moral suatu negara melalui pelestarian atau penggunaan simbol budaya (Todorović 2022, 851–852; Nye 2004, 11).

Dalam hal ini, transformasi Ayasofya dan Kariye dapat dibaca sebagai upaya memperkuat narasi identitas Islam dan kontinuitas sejarah Utsmaniyah, yang sekaligus menjadi bagian dari diplomasi simbolik ke dunia Muslim dan Barat. Penting untuk membedakan *heritage diplomacy* dari *cultural diplomacy*. Todorović menekankan bahwa meskipun keduanya sama-sama bertujuan membangun citra negara, pendekatan yang digunakan berbeda. *Cultural diplomacy* lebih menekankan pada penyebaran budaya nasional seperti seni dan bahasa, sedangkan *heritage diplomacy* lebih bersifat reaktif dan simbolik menggunakan warisan budaya untuk membentuk narasi diplomatik yang bersifat strategis (Todorović 2022, 852–853).

Dalam konteks ini, keputusan Turki atas Ayasofya dan Kariye dapat dipahami sebagai bentuk *heritage diplomacy* yang menyampaikan pesan geopolitik secara simbolik. Dengan menggunakan kerangka *heritage as*

diplomacy, transformasi Ayasofya dan Kariye dianalisis sebagai praktik diplomatik yang menysar dua audiens: publik domestik dan komunitas internasional. Bagi publik domestik, perubahan status situs memperkuat identitas keagamaan dan nasional. Sementara di tingkat internasional, tindakan ini menantang narasi sekularisme warisan Barat dan menegaskan otonomi budaya Turki dalam menghadapi tekanan lembaga internasional seperti UNESCO (Todorović 2022, 856–857).

Meskipun *heritage diplomacy* belum diakui secara formal dalam struktur diplomatik negara, Todorović menegaskan bahwa praktiknya nyata dan signifikan (Todorović 2022, 853). Kerangka ini membantu mengungkap bagaimana warisan budaya dapat menjadi alat negosiasi identitas, pengaruh, dan legitimasi dalam politik internasional. Dengan pendekatan ini, studi kasus Ayasofya dan Kariye dapat dianalisis tidak hanya dalam konteks domestik, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kekuasaan budaya transnasional, termasuk respons dari negara-negara lain dan organisasi global. Dengan mengacu pada Todorović (2022), kerangka pemikiran *heritage diplomacy* menyediakan fondasi teoritis yang kuat dan relevan untuk menganalisis kebijakan transformasi situs warisan dunia oleh pemerintah Turki. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dimensi simbolik, politik, dan diplomatik dari kebijakan yang tampaknya bersifat domestik. Dalam konteks Ayasofya dan Kariye, warisan budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga sumber daya strategis yang digunakan untuk membentuk relasi dan posisi Turki dalam konstelasi global kontemporer.

1.7 Argumen Sementara

Keputusan Turki mengubah Ayasofya dan Kariye menjadi masjid pada 2020 di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan memperlihatkan bagaimana diplomasi warisan budaya dijalankan sebagai strategi politik dan simbolik. Transformasi ini tidak hanya menegaskan kedaulatan Turki atas situs bersejarah, tetapi juga mengartikulasikan kembali identitas keislaman negara yang selama puluhan tahun dibayangi sekularisme. Dalam kerangka teori Tim Winter dan Todorovic (2022), warisan budaya berfungsi sebagai instrumen *soft power* yang memungkinkan negara memproyeksikan identitas nasional sekaligus memengaruhi persepsi internasional. Erdogan menggunakan Ayasofya dan Kariye sebagai simbol kebangkitan nilai Islam dan kejayaan Ottoman untuk memperkuat legitimasi politik domestik, terutama di kalangan konservatif.

Di tingkat internasional, kebijakan ini mengirimkan pesan simbolis kepada dunia Islam. Dukungan dari negara seperti Pakistan, Iran, dan Malaysia menunjukkan bahwa langkah tersebut dipandang sebagai tanda keberanian Turki menegaskan kedaulatan dan kepemimpinan simbolis umat Muslim. Namun, di sisi lain, kritik datang dari Barat. Eropa, Amerika Serikat, dan Yunani menilai perubahan status Ayasofya dan Kariye sebagai ancaman terhadap prinsip multikulturalisme. UNESCO juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai universal situs yang diakui sebagai warisan dunia. Secara keseluruhan, transformasi Ayasofya dan Kariye mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, politik, dan identitas dalam diplomasi warisan budaya. Melalui heritage diplomacy, Turki berusaha menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan ambisi

global, menjadikan warisan budaya bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi juga alat diplomasi dan negosiasi pengaruh di era modern.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis kualitatif. Merujuk kepada Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi serta memahami arti sejumlah individu atau kelompok orang dari masalah sosial ataupun kemanusiaan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti juga berfokus pada deskripsi, konteks, dan interpretasi data, serta juga memahami suatu perspektif subjektif dari partisipan penelitian. Selanjutnya, Creswell juga menyatakan pendekatan kualitatif dapat memungkinkan peneliti ini menggunakan literatur secara konsisten dan juga menggunakan asumsi pembelajaran yang memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang holistik. Salah satu alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini dikarenakan penelitian ini dapat berupa eksploratif dan juga aspek dalam topik yang masih tidak banyak yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti berusaha untuk memberikan dan membangun pemahan berdasarkan apa yang sudah di ketahui (Creswell 2018).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam kebijakan diplomasi warisan budaya Turki, terutama pemerintahan Recep Tayyip Erdogan beserta aktor-aktor lain yang mendukung atau menentang transformasi museum-museum tersebut. Ini mencakup aktor-aktor politik, lembaga pemerintah, serta

tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait warisan budaya.

Objek penelitian adalah transformasi fisik dan status hukum Museum Ayasofya dan Museum Kariye menjadi masjid, termasuk proses, dinamika, dan dampak dari kebijakan tersebut dalam konteks diplomasi warisan budaya. Ini mencakup analisis kebijakan, reaksi domestik dan internasional, serta implikasi politik dan sosial dari perubahan status dua situs warisan budaya tersebut.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka. Studi literatur dan data pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian dari kajian literatur seperti buku dan berbagai data laporan yang memiliki keterkaitan dengan suatu masalah yang akan dipecahkan (Ardiansyah, Risnita, and Jailani, 2023). Dalam metode pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber yang valid, penulis menggunakan literatur yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini akan lebih detail dalam memaparkan serta menjelaskan mengapa Turki di bawah kekuasaan Recep Tayyip Erdogan mengubah situs warisan dunia UNESCO Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan data yang berbentuk primer dan data sekunder untuk bisa menjelaskan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini berasal dari artikel yang secara resmi dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan, data yang sifatnya

sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi literatur dan studi pustaka seperti berita, buku, jurnal dan juga sumber artikel yang valid serta akurat.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan penelitian ini maka, penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan berikut:

Bab I adalah Bab ini memaparkan latar belakang penelitian mengenai kontroversi perubahan status Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid pada tahun 2020. Selain itu, bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Bab ini menjelaskan konsep *carrier* dalam kerangka *heritage diplomacy*, proses transformasi Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid, serta analisis bagaimana kedua situs tersebut dipakai sebagai simbol (*carrier*) identitas nasional dan legitimasi politik di Turki.

Bab III, Bab ini membahas posisi Ayasofya dan Kariye sebagai warisan bersama (*common heritage*) yang diakui UNESCO, serta respon internasional terhadap transformasi keduanya. Analisis difokuskan pada peran berbagai aktor, baik domestik maupun internasional, serta implikasi diplomatik dari kebijakan pemerintah Turki dalam kerangka *heritage diplomacy*.

Bab IV, penulis akan memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga rekomendasi penelitian.

BAB II

ANALISIS AYASOFYA DAN KARIYE SEBAGAI *CARRIER* UNTUK IDENTITAS NASIONAL

Transformasi status Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid pada tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari peran keduanya sebagai *carrier* dalam hubungan diplomatik, khususnya dalam membangun dan memperkuat identitas nasional Turki. Konsep *carrier* dalam kerangka *heritage as diplomacy* Miloš Todorović merujuk pada warisan budaya yang menjadi pembawa nilai, makna, dan simbol tertentu yang dapat dimobilisasi untuk tujuan politik maupun diplomasi (Todorović 2022, 851). Dalam konteks Turki, Ayasofya dan Kariye bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan simbol peradaban, kemenangan, sekaligus representasi kontinuitas sejarah yang dipilih oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, untuk meneguhkan narasi identitas nasional yang bercorak Islam-Turki (Hisarlıoğlu, Karagiannopoulou, and Yanık 2024, 6).

Ayasofya sejak awal berdirinya telah memikul lapisan identitas yang kompleks. Awalnya ia merupakan gereja agung Byzantium, lalu berubah menjadi masjid setelah penaklukan Konstantinopel pada 1453, kemudian dialihfungsikan menjadi museum pada masa Mustafa Kemal Atatürk tahun 1934, dan akhirnya kembali menjadi masjid pada 2020. Pergantian status ini menunjukkan bagaimana Ayasofya secara berulang dijadikan *carrier* yang memproyeksikan narasi politik sesuai dengan rezim yang berkuasa (Kuru 2020). Sementara itu, Kariye, meskipun tidak seterkenal Ayasofya, tetap memiliki nilai simbolis yang sejalan. Sebagai bangunan peninggalan Bizantium dengan mosaik Kristen yang khas, Kariye

menjadi medium simbolik yang menegaskan kembali orientasi politik-religius pemerintah Turki kontemporer ketika statusnya juga dikembalikan menjadi masjid (Suhartono 2020).

Dalam kerangka pembentukan identitas nasional, kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks domestik Turki. Erdoğan menggunakan warisan budaya ini untuk menjawab kerinduan sebagian masyarakat Turki terhadap kejayaan Ottoman, sekaligus sebagai kritik implisit terhadap warisan sekuler Kemalis yang dianggap “menjauhkan” bangsa dari akar Islam (Mujahidin 2022, 183). Dengan demikian, Ayasofya dan Kariye menjadi *carrier* yang membawa memori sejarah Ottoman dan disalurkan kembali dalam bentuk identitas nasional baru yang lebih religius dan konservatif. Pemanfaatan warisan budaya sebagai *carrier* identitas ini memperlihatkan bahwa heritage tidak pernah statis, melainkan selalu dinegosiasikan ulang sesuai kebutuhan politik dan diplomasi (Winter 2015, 999).

Fungsi *carrier* ini juga memperkuat legitimasi politik Erdoğan. Dengan mengembalikan Ayasofya dan Kariye sebagai masjid, ia tidak hanya mendapatkan dukungan politik domestik dari kelompok konservatif dan nasionalis-religius, tetapi juga meneguhkan dirinya sebagai pemimpin yang “mewarisi” tradisi para Sultan Ottoman (Soner Cagaptay 2020). Dalam kerangka diplomasi, langkah ini memperlihatkan bagaimana warisan dapat dijadikan instrumen untuk menghubungkan sejarah masa lalu dengan narasi politik masa kini. Identitas nasional yang dibangun melalui transformasi ini bukan hanya ditujukan untuk konsumsi domestik, tetapi juga untuk diproyeksikan keluar sebagai pesan politik bahwa Turki di bawah Erdoğan merupakan pewaris sah peradaban Ottoman dan sekaligus pemimpin dunia Islam kontemporer (Filipović 2022, 265).

Dengan demikian, analisis terhadap Ayasofya dan Kariye sebagai *carrier* bagi identitas nasional menunjukkan bahwa keduanya bukan sekadar situs sejarah yang “netral,” tetapi instrumen aktif dalam pembentukan narasi kebangsaan. Warisan budaya di sini berperan ganda: sebagai simbol domestik untuk memperkuat legitimasi politik dan solidaritas nasional, sekaligus sebagai sarana diplomasi yang menyampaikan pesan identitas Turki di ranah internasional. Oleh karena itu, dalam kerangka *heritage as diplomacy*, kasus Ayasofya dan Kariye dapat dipahami sebagai praktik konkret bagaimana heritage dipakai untuk mengartikulasikan dan menegaskan identitas nasional dalam konteks politik global kontemporer (Yanik 2020, 5).

2.1 Konsep *Carrier* dalam *Heritage diplomacy*

Dalam kajian *heritage diplomacy*, konsep *carrier* digunakan untuk menjelaskan aktor, medium, maupun institusi yang bertugas membawa, menyebarkan, dan memperluas makna warisan budaya melampaui batas geografis maupun politik. Warisan budaya tidak berdiri sebagai entitas netral; ia senantiasa ditafsirkan dan diberi makna baru sesuai konteks politik, sosial, serta ideologis. Di sinilah *carrier* berperan sebagai penghubung antara nilai simbolik dari suatu situs dengan tujuan diplomatik yang lebih luas (Winter 2015, 998).

Carrier dapat berupa negara, organisasi internasional, maupun komunitas lokal. Negara biasanya tampil sebagai aktor dominan karena memiliki kapasitas politik dan diplomatik untuk menggunakan warisan budaya sebagai instrumen *soft power*. Contohnya, konversi Hagia Sophia menjadi masjid oleh pemerintah Turki pada 2020 dimaknai sebagai strategi diplomasi budaya sekaligus simbol

kedaulatan. Melalui langkah ini, pemerintah bertindak sebagai carrier yang menyalurkan narasi kebangkitan identitas Islam, tidak hanya kepada publik domestik, tetapi juga ke komunitas internasional (Hisarlıoğlu, Karagiannopoulou, and Yanık 2024, 3).

Selain negara, organisasi internasional juga dapat berfungsi sebagai carrier global. UNESCO melalui mekanisme *World Heritage List* berperan dalam memberikan legitimasi universal terhadap suatu situs. Label “warisan dunia” tidak hanya menegaskan nilai sejarah, tetapi juga memperkuat posisi tawar negara di arena diplomasi. Namun, status ini dapat menciptakan ketegangan antara kepentingan nasional dengan standar universal yang dipromosikan UNESCO (Cesari 2010, 301). Oleh karena itu, UNESCO dapat dilihat sebagai carrier yang tidak hanya menyebarkan narasi pelestarian, tetapi juga menegosiasikan batas antara klaim kedaulatan dan nilai kemanusiaan universal.

Peran masyarakat sipil dalam kerangka carrier juga signifikan. Aksi kolektif seperti petisi publik menegaskan bahwa warisan budaya tidak hanya dikuasai negara atau organisasi internasional, melainkan juga dimaknai oleh komunitas akar rumput. Petisi masyarakat Kocaeli pada 2013 yang mendesak konversi Hagia Sophia kembali menjadi masjid merupakan contoh konkret bagaimana aspirasi lokal mampu memengaruhi wacana politik nasional (Citizens of the Kocaeli Province 2013). Dalam konteks ini, masyarakat bertindak sebagai carrier identitas kolektif yang memperluas legitimasi simbolik suatu situs.

Selain aktor formal, media massa memiliki peran sebagai carrier diskursif. Media internasional seperti *CNN* dan *Al Jazeera* turut membentuk persepsi global mengenai konversi Hagia Sophia. Pemberitaan mereka bukan hanya

menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat simbolisme politik yang dilekatkan pada situs. Dengan demikian, media berfungsi sebagai saluran penting bagi diplomasi warisan budaya, terutama dalam membentuk opini publik internasional mengenai legitimasi tindakan suatu negara (Yanik 2020, 12).

Lebih lanjut, perdebatan akademik tentang carrier menekankan pentingnya memahami dimensi simbolik heritage. Carrier tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan makna baru yang melekat pada situs. Winter (2015, 1001) menekankan bahwa diplomasi warisan bukanlah proses statis; ia merupakan arena negosiasi di mana aktor-aktor berbeda membentuk ulang warisan sesuai kepentingannya. Dengan kata lain, carrier adalah agen produksi makna yang memungkinkan warisan budaya berfungsi ganda: sebagai aset kultural sekaligus instrumen politik.

Di sisi lain, terdapat ketegangan antara kepentingan nasional dan narasi universal yang dibawa oleh carrier berbeda. Negara sering menekankan heritage sebagai simbol identitas nasional, sementara organisasi internasional berupaya mengedepankan nilai universalitas. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa diplomasi warisan tidak pernah netral; ia selalu dipenuhi tarik-menarik kepentingan. Dalam kasus Turki, konversi Hagia Sophia menunjukkan bagaimana pemerintah menolak narasi universal UNESCO dengan menekankan hak kedaulatan untuk menentukan fungsi situs bersejarah (Hisarlıoğlu, Karagiannopoulou, and Yanik 2024, 5).

Konsep carrier juga mengingatkan bahwa diplomasi warisan dapat berlangsung melalui praktik sehari-hari. Festival budaya, pameran, atau kerja sama akademik dapat berfungsi sebagai sarana diplomasi non-formal di mana

aktor non-negara bertindak sebagai carrier. Walaupun skala pengaruhnya lebih kecil, praktik ini tetap penting karena menciptakan narasi alternatif yang melengkapi atau bahkan menantang narasi resmi negara (Cesari 2010, 318).

Dengan demikian, konsep carrier dalam heritage diplomacy menegaskan bahwa nilai suatu warisan tidak pernah terlepas dari aktor yang menyalurkannya. Baik negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, maupun media, semuanya berperan dalam membentuk makna dan legitimasi heritage di kancah global. Carrier tidak hanya menjaga warisan, melainkan juga menghidupkannya sebagai instrumen diplomasi yang terus diperdebatkan, diproduksi ulang, dan diproyeksikan ke dalam relasi politik internasional.

2.2 Proses Transformasi Ayasofya dan Kariye

Transformasi Ayasofya dan Kariye menunjukkan bagaimana warisan budaya di Turki selalu menjadi arena tarik-menarik politik, ideologi, dan hukum. Keduanya bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi simbol yang merefleksikan pergeseran dari kekuasaan Bizantium, kejayaan Ottoman, hingga sekularisasi era Republik Turki modern. Perubahan status mereka—dari gereja, masjid, museum, lalu kembali menjadi masjid—memperlihatkan bagaimana heritage berfungsi sebagai medium diplomasi sekaligus instrumen legitimasi politik (Winter 2015, 999; Todorović 2022, 851).

Tabel 2. Kronologi Transformasi Ayasofya dan Kariye

Tahun Masehi	Ayasofya	Kariye	Instrumen Hukum/Politik
537	Basilika Bizantium(dibangun Kaisar Justinianus I)	Gereja Bizantium awal	Perintah Kekaisaran Bizantium

1453	Diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II	Awal abad ke-16 diubah menjadi masjid	<i>Waqfiyya</i> Sultan Mehmed II
1934	Museum berdasarkan Keputusan Dewan Menteri No. 2/1589 (Ataturk)	-	Kebijakan Sekularisasi Republik
1945	-	Museum Berdasarkan keputusan Dewan Menteri	Restorasi Byzantine Institute
2019	-	Putusan Danıştay membatalkan status museum	Pengadilan Administratif Tinggi
2020	Museum Ayasofya dibatalkan oleh Danıştay; dekret Erdoğan kembalikan fungsi masjid	Erdoğan tetapkan kembali sebagai masjid	Putusan Danıştay + Dekret Presiden

Sumber: (Sumber: disusun penulis berdasarkan Bahçeci and Yolcu 2022; Sujati and Iryana 2020; Berk Özkan 2020; hurriyetdailynews 2020; Dea Alvi Soraya 2020.)

2.2.1 Ayasofya

Ayasofya yang dibangun tahun 537 berfungsi sebagai basilika utama Bizantium hingga 1453 ketika Sultan Mehmed II mengubahnya menjadi masjid. Keputusan ini dipertegas melalui *waqfiyya* yang menetapkan bahwa bangunan tersebut adalah masjid permanen (Bahçeci and Yolcu 2022). Namun, pada 1934, pemerintah republik menentukannya sebagai museum melalui keputusan Dewan Menteri. Langkah tersebut tidak hanya mencerminkan kebijakan sekularisasi, tetapi juga strategi diplomasi budaya untuk menunjukkan citra modern Turki di hadapan dunia (Sujati and Iryana 2020, 280).

Pada 10 Juli 2020, Daniştay membatalkan keputusan 1934 dengan alasan bahwa *waqfiyya* Sultan Mehmed II bersifat mengikat secara hukum (Berk Özkan 2020). Presiden Erdoğan kemudian menandatangani dekret yang mengembalikan status masjid. Keputusan ini memicu reaksi internasional: UNESCO menyatakan penyesalan karena perubahan status dilakukan tanpa konsultasi (Billy Dewanda 2020), sementara Yunani dan Uni Eropa mengkritiknya sebagai tindakan provokatif (Utomo 2020; Josep Borrell 2020). Meski demikian, pemerintah Turki menegaskan bahwa Ayasofya tetap terbuka bagi semua pihak, sebuah retorika yang dipakai untuk meneguhkan klaim kedaulatan nasional (Directorate of Communications 2020).

2.2.2 Kariye

Kariye, yang didirikan sebagai gereja Bizantium pada abad ke-11, juga mengalami dinamika serupa. Setelah diubah menjadi masjid pada awal abad ke-16, bangunan ini dijadikan museum pada 1945 melalui keputusan Dewan Menteri. Status tersebut bertahan hingga 2019, ketika Daniştay memutuskan bahwa konversi museum bertentangan dengan akta wakaf Ottoman (hurriyetdailynews 2020). Pada Agustus 2020, Presiden Erdoğan mengesahkan keputusan untuk mengembalikan Kariye sebagai masjid. Walau skalanya lebih kecil daripada Ayasofya, konversi ini tetap menegaskan pola konsistensi pemerintah dalam menggunakan warisan budaya sebagai instrumen politik (Dea Alvi Soraya 2020). Media menyoroti bahwa keputusan ini menguatkan citra neo-Ottomanisme yang tengah didorong Erdoğan (Anton Suhartono 2020).

Sama seperti Ayasofya, langkah ini juga memicu kritik dari UNESCO dan komunitas internasional karena dinilai mengurangi karakter multikultural situs warisan dunia (Hariz Barak 2020). Namun, pemerintah menegaskan situs tetap dapat diakses wisatawan di luar waktu ibadah (Müze İstanbul 2020).

2.3 Ayasofya dan Kariye sebagai *Carrier Diplomatic Relations*

Dalam kerangka konseptual Todorović (2022), warisan budaya memainkan peran sebagai *carrier of diplomatic relations*, yakni medium yang tidak hanya mewakili identitas, tetapi juga menyalurkan komunikasi, konflik, dan negosiasi antara negara dengan aktor global lain. Heritage dalam posisi ini bukanlah objek statis, melainkan agen simbolik yang memediasi hubungan antarnegara. Kategori ini membantu membaca transformasi Ayasofya dan Kariye bukan semata sebagai isu politik domestik, melainkan sebagai bagian dari diplomasi Turki di arena internasional.

Konversi Ayasofya pada 2020 memperlihatkan bagaimana sebuah situs heritage dapat menjadi medium komunikasi antara Turki dan komunitas internasional. Keputusan pengadilan administratif (Danıştay) menegaskan kedaulatan hukum domestik, tetapi sekaligus memantik dialog global. UNESCO menilai langkah itu sebagai pelanggaran terhadap norma pengelolaan warisan dunia (Barak 2020), sementara Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas implikasinya terhadap nilai kebersamaan internasional (Borrell 2020). Dalam perspektif Todorović (2022, 853), reaksi ini menunjukkan bahwa heritage berfungsi sebagai kanal diplomasi: ia menghubungkan klaim kedaulatan Turki

dengan tanggapan normatif aktor internasional, sehingga relasi antarnegara dimediasi melalui simbol warisan budaya.

Kariye juga memainkan fungsi serupa, meskipun tidak menimbulkan dampak sebesar Ayasofya. Transformasinya ke masjid segera dikaitkan media dengan kebijakan Ayasofya, memperlihatkan pola konsistensi politik identitas (hurriytdailynews 2020). Soraya (2020) mencatat bahwa keputusan ini memperkuat narasi neo-Ottomanisme yang menjadi ciri kebijakan Erdoğan. Dalam kerangka *carrier of diplomatic relations*, Kariye berperan sebagai simbol pelengkap yang menyampaikan pesan konsistensi politik ke dunia internasional. Ia memperlihatkan bagaimana Turki menegaskan legitimasi atas warisan Bizantium yang kini diposisikan kembali dalam kerangka Islam, sehingga relasi diplomatik terbentuk bukan hanya melalui Ayasofya, tetapi juga melalui situs-situs lain yang bernuansa serupa.

Kedua situs itu sekaligus menjadi sarana negosiasi citra internasional. Pemerintah menegaskan bahwa meski status keagamaan ditegaskan kembali, akses wisatawan tetap terbuka, bahkan karya seni seperti mosaik Bizantium di Kariye tetap dipelihara (Müze İstanbul 2020). Pernyataan semacam ini bukan sekadar teknis pelestarian, melainkan bentuk komunikasi diplomatik yang menyeimbangkan identitas domestik dengan citra global. Todorović (2022, 852) menekankan bahwa heritage sering kali digunakan sebagai medium *double communication* dalam diplomasi: menyampaikan pesan kedaulatan ke dalam negeri sekaligus menjaga reputasi negara di mata luar. Dengan demikian, heritage berfungsi sebagai jembatan simbolik yang memungkinkan Turki menjaga

hubungan dengan dunia internasional meski mengambil kebijakan yang kontroversial.

Lebih jauh, Ayasofya dan Kariye menjadi arena kontestasi normatif yang menghubungkan Turki dengan aktor global. UNESCO menegaskan perlunya konsultasi internasional, sedangkan Turki menolak dengan alasan kedaulatan (Barak 2020; Directorate of Communications 2020). Negosiasi ini menunjukkan praktik diplomasi yang berlangsung melalui heritage, di mana status dan makna situs tidak ditentukan sepihak, melainkan dipertarungkan melalui wacana politik global. Todorović (2022, 854) menggambarkan situasi semacam ini sebagai bentuk diplomasi heritage yang berlangsung dalam ketegangan, bukan harmoni. Ayasofya dan Kariye, dengan demikian, adalah ruang simbolik di mana hubungan diplomatik antara Turki, UNESCO, Uni Eropa, dan negara lain terbentuk melalui perdebatan atas legitimasi.

Selain itu, heritage dalam kasus ini berfungsi sebagai instrumen resistensi. Dengan tetap melaksanakan kebijakan meski menghadapi kritik, Turki mengirimkan pesan bahwa ia tidak tunduk pada standar internasional yang dianggap membatasi. Winter (2015, 1003) menegaskan bahwa heritage dapat berfungsi sebagai perangkat politik simbolik yang menantang dominasi global. Dalam kerangka Todorović, fungsi ini tetap bagian dari *carrier of diplomatic relations* karena penolakan atas norma global merupakan bentuk komunikasi diplomatik tersendiri: Turki membangun hubungan internasional dengan cara resistensi terhadap aturan yang dianggap eksternal. Dalam pidato resmi menyusul keputusan mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid pada Juli 2020, Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengatakan: “Kebangkitan Hagia Sophia adalah

pertanda pembebasan Masjid al-Aqsa. Kebangkitan Hagia Sophia adalah kehendak umat Islam di seluruh dunia untuk keluar dari masa-masa kehampaan.” (Munawwar 2020).

Dengan demikian, Ayasofya dan Kariye memperlihatkan peran heritage sebagai carrier of diplomatic relations dalam arti yang kompleks. Keduanya menjadi kanal komunikasi simbolik antara negara dan komunitas internasional, sarana negosiasi citra global, arena kontestasi normatif, serta instrumen resistensi politik. Analisis ini memperkuat klaim Todorović (2022, 852–54) bahwa heritage tidak sekadar menyampaikan narasi identitas, tetapi juga membentuk relasi antaraktor melalui praktik diplomatik yang berlangsung di sekitarnya. Dalam konteks Turki, warisan budaya tersebut berfungsi bukan hanya sebagai saksi sejarah, melainkan sebagai agen diplomatik yang aktif membentuk interaksi global kontemporer.

BAB III

ANALISIS AYASOFYA DAN KARIYE SEBAGAI *COMMON HERITAGE*

DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK

Konsep *common heritage of humanity* menekankan bahwa warisan budaya tertentu memiliki nilai universal yang melampaui batas negara, sehingga keberadaannya dipandang sebagai milik kolektif umat manusia. Dalam kerangka diplomasi, status ini menjadikan heritage sebagai instrumen yang tidak hanya mencerminkan identitas lokal, tetapi juga menghubungkan komunitas global melalui narasi sejarah bersama. Winter (2015, 1000) menyebut bahwa *heritage diplomacy* sering bekerja pada tataran universalitas simbolik, di mana monumen atau situs tertentu diperlakukan sebagai milik bersama, sehingga setiap perubahan statusnya memiliki resonansi global.

Ayasofya adalah contoh yang paling jelas dari konsep ini. Dibangun sebagai katedral Bizantium pada abad ke-6, kemudian diubah menjadi masjid setelah penaklukan Ottoman pada 1453, lalu difungsikan sebagai museum pada 1934, situs ini memuat lapisan sejarah yang kompleks dan menghubungkan beragam tradisi keagamaan serta peradaban (Bahçeci and Yolcu 2022, 3). Keputusan menjadikannya museum pada masa Atatürk menandai upaya menempatkan Ayasofya sebagai simbol inklusivitas dan warisan bersama dunia. Status ini diperkuat dengan penetapannya sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, yang menegaskan nilainya sebagai *common heritage*. Karena itu, ketika Turki mengubah statusnya kembali menjadi masjid pada 2020, reaksi keras dari UNESCO dan Uni Eropa muncul bukan semata-mata karena alasan politik, tetapi

juga karena langkah tersebut dipandang mengubah status warisan bersama yang seharusnya dijaga dalam bingkai universal (Barak 2020; Borrell 2020).

Kariye, meski tidak sepopuler Ayasofya, juga merepresentasikan nilai *common heritage*. Sebagai bekas gereja Bizantium dengan mosaik bersejarah yang diakui dunia, statusnya sebagai museum menempatkannya dalam kategori warisan bersama yang dapat diakses lintas identitas. Ketika statusnya diubah kembali menjadi masjid pada 2020, UNESCO menilai bahwa langkah itu menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Turki terhadap kewajiban internasional dalam menjaga situs warisan dunia (hurriyetaidailynews 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa heritage dengan nilai lintas peradaban membawa dimensi diplomatik yang kompleks, di mana pengelolaan domestik langsung berimplikasi pada hubungan internasional.

Dalam perspektif Todorović (2022, 853), ketika heritage diperlakukan sebagai *common heritage*, ia otomatis menjadi kanal komunikasi diplomatik. Perubahan fungsi heritage tersebut tidak hanya mencerminkan kebijakan nasional, tetapi juga menghasilkan percakapan global mengenai siapa yang berhak mengelola, memaknai, dan mengaksesnya. Dengan demikian, Ayasofya dan Kariye berfungsi sebagai penghubung dalam hubungan diplomatik—baik melalui solidaritas, perdebatan, maupun konflik normatif.

Namun, status *common heritage* juga menimbulkan ketegangan. Turki menegaskan bahwa meski situs-situs ini diakui dunia, pengelolaan tetap berada di bawah kedaulatannya. Erdoğan menyatakan bahwa Ayasofya tetap terbuka bagi semua pengunjung, bahkan setelah menjadi masjid (Directorate of Communications 2020). Retorika ini memperlihatkan upaya menyeimbangkan

dua klaim yang tampaknya bertentangan: universalitas warisan dan kedaulatan nasional. Winter (2015, 1003) menjelaskan bahwa dilema semacam ini merupakan ciri khas diplomasi heritage, di mana negara harus mengelola warisan yang bernilai universal tanpa kehilangan otoritas domestik.

Selain menjadi titik konflik, *common heritage* juga berfungsi sebagai sarana membangun citra internasional. Dengan menekankan bahwa Ayasofya dan Kariye tetap terbuka untuk wisatawan mancanegara, Turki berusaha menjaga reputasinya sebagai negara tujuan budaya dunia (Müze İstanbul 2020). Diplomasi semacam ini memperlihatkan bagaimana heritage digunakan secara strategis: ia dipresentasikan sebagai simbol identitas nasional sekaligus aset global. Todorović (2022, 852) menekankan bahwa dalam kasus seperti ini, heritage bertindak sebagai agen simbolik yang menyampaikan pesan ganda—memperkuat legitimasi domestik dan mempertahankan hubungan diplomatik melalui narasi *common heritage*.

Dengan demikian, Ayasofya dan Kariye memperlihatkan paradoks warisan bersama: keduanya memiliki nilai universal yang menghubungkan bangsa-bangsa, tetapi pada saat yang sama menjadi instrumen negara untuk menegaskan kedaulatan. Dalam hubungan diplomatik, paradoks ini justru memperkuat peran heritage sebagai *carrier*. Ayasofya dan Kariye menjadi medium dialog, negosiasi, dan bahkan konflik antara Turki dan dunia internasional. Keduanya menegaskan bahwa warisan budaya yang berstatus *common heritage* bukan hanya ruang pelestarian, tetapi juga arena politik global yang menentukan dinamika hubungan diplomatik kontemporer.

3.1 Konsep *Common* dalam *Heritage Diplomacy*

Konsep *common heritage* dalam diplomasi warisan berangkat dari gagasan bahwa terdapat situs budaya atau sejarah tertentu yang nilainya dianggap melampaui batas negara dan menjadi milik kolektif umat manusia. Winter (2015, 1000) menegaskan bahwa *heritage diplomacy* beroperasi bukan hanya dalam konteks identitas nasional, tetapi juga pada level universalitas, di mana negara pemilik warisan dituntut untuk menyeimbangkan kedaulatannya dengan tanggung jawab global.

Operasionalisasi *common heritage* berlangsung melalui kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi Warisan Dunia UNESCO 1972, yang menekankan bahwa situs dengan *outstanding universal value* harus dilindungi untuk kepentingan umat manusia (Winter 2015, 1001). Mekanisme ini melibatkan tiga hal utama: inskripsi situs dalam daftar warisan dunia, kewajiban negara untuk melaporkan kondisi situs secara berkala, dan kewajiban melakukan konsultasi internasional sebelum perubahan signifikan dilakukan (Todorović 2022, 852). Dengan cara ini, *common heritage* menjadi instrumen diplomatik, karena setiap keputusan domestik terkait situs tersebut otomatis terbuka untuk ditanggapi komunitas global.

Kasus Ayasofya menggambarkan dinamika ini secara nyata. UNESCO menyatakan keprihatinannya atas keputusan Turki mengubah status Ayasofya menjadi masjid pada 2020, menekankan bahwa “status warisan dunia tidak boleh diubah secara sepihak tanpa dialog internasional” (Barak 2020). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa UNESCO memperlakukan Ayasofya sebagai *common heritage of humanity*. Hal yang sama ditegaskan oleh Dewan Gereja Dunia, yang

menilai konversi tersebut mengabaikan fungsi Ayasofya sebagai simbol universal persatuan antaragama (World Council of Churches 2020). Uni Eropa melalui Josep Borrell juga menyatakan bahwa perubahan itu berimplikasi pada hubungan antaragama dan relasi Turki dengan tetangganya (Borrell 2020). Reaksi-reaksi ini menunjukkan bahwa Ayasofya dipandang tidak hanya sebagai monumen nasional, tetapi sebagai milik bersama umat manusia yang pengelolaannya menyangkut kepentingan internasional.

Kariye pun memperoleh perhatian serupa. Sebagai bagian dari “Historic Areas of Istanbul,” UNESCO menegaskan bahwa transformasi Kariye menjadi masjid menimbulkan pertanyaan serius terkait komitmen Turki terhadap perlindungan warisan dunia (hurriyetdailynews 2020). Dengan demikian, baik Ayasofya maupun Kariye ditempatkan dalam kerangka *common heritage*, karena keduanya dipandang memiliki nilai universal yang melampaui batas kedaulatan negara.

3.1.1 Shared Heritage

Jika *common heritage* menekankan universalitas warisan sebagai milik bersama umat manusia, maka *shared heritage* mengacu pada warisan yang dimaknai secara kolektif oleh komunitas yang berbeda, sering kali melintasi identitas agama, etnis, atau bangsa. Winter (2015, 999) menjelaskan bahwa *shared heritage* muncul ketika suatu situs menjadi titik temu dari berbagai narasi sejarah, sehingga diakui bersama sebagai ruang simbolik yang mempersatukan. Dalam kerangka diplomasi, *shared heritage* dapat berfungsi sebagai instrumen solidaritas, tetapi sekaligus berpotensi melahirkan konflik tafsir. Todorović (2022,

853) menekankan bahwa *shared heritage* menuntut adanya dialog antaraktor mengenai makna dan pengelolaan situs, sebab kepemilikan simbolisnya tidak bisa diklaim secara sepihak.

Ayasofya adalah contoh paling jelas dari *shared heritage*. Sebagai gereja Bizantium selama hampir seribu tahun, kemudian masjid Ottoman selama lima abad, dan akhirnya museum pada 1934, Ayasofya mengandung lapisan identitas yang berbeda. UNESCO pada 2020 menegaskan bahwa Ayasofya adalah “jembatan antara Eropa dan Asia, serta Kristen dan Islam” (UNESCO 2020). Narasi ini menunjukkan bahwa situs tersebut diperlakukan sebagai *shared heritage*, karena diakui sebagai simbol keterhubungan lintas peradaban.

Kariye juga dapat dipahami sebagai *shared heritage* karena mosaik Bizantiumnya menjadi representasi penting bagi komunitas Kristen, sementara sejarah panjangnya sebagai masjid Ottoman menjadikannya signifikan bagi umat Islam. Statusnya sebagai museum sejak 1945 hingga 2020 merefleksikan upaya menjadikan Kariye sebagai ruang bersama yang terbuka untuk semua komunitas. Namun, keputusan mengubahnya kembali menjadi masjid menimbulkan pertanyaan apakah sifat *shared heritage*-nya masih dipertahankan atau digeser menuju klaim kedaulatan nasional (hurriyetdailynews 2020).

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara *common heritage* dan *shared heritage* terletak pada fokusnya: *common heritage* menekankan universalitas dan kepemilikan kolektif umat manusia secara hukum internasional, sementara *shared heritage* menekankan keterhubungan simbolik yang diakui bersama lintas identitas. Kasus Ayasofya dan Kariye memperlihatkan bagaimana keduanya dapat berfungsi sebagai *common heritage* (dalam kerangka UNESCO

dan hukum internasional) sekaligus sebagai *shared heritage* (dalam narasi keterhubungan lintas peradaban).

3.2 Respon International Terhadap Transformasi

Dengan semakin menguatnya politik domestik Turki pada dekade 2010-an, muncul dorongan dari kelompok Islamis dan nasionalis untuk mengembalikan fungsi Ayasofya sebagai masjid. Sejumlah organisasi keagamaan dan partai konservatif aktif mengajukan petisi serta kampanye publik yang menekankan pentingnya menghidupkan kembali fungsi ibadah bangunan tersebut (Altinordu 2016; Erder and Cevat 2016). Narasi politik mengenai warisan Ottoman pun semakin menonjol, ditandai dengan kebijakan pemerintah yang mengedepankan simbol Kekhalifahan Utsmaniyah melalui renovasi masjid bersejarah serta pembangunan kembali monumen-monumen Ottoman sebagai bagian dari politik budaya (Donelli 2019, 115).

Sejak tahun 2010, diplomasi warisan budaya Turki bertransformasi menjadi alat penting dalam memperkuat citra negara sebagai pemimpin dunia Islam (Yanık 2020). Pada 2013, sebuah momen bersejarah terjadi ketika pemerintah mengizinkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an di Ayasofya untuk pertama kalinya sejak statusnya ditetapkan sebagai museum pada 1934 (Anadolu Ajansı 2015). Langkah serupa juga terlihat pada Kariye, yang mulai menjadi bagian dari wacana publik terkait pengembalian statusnya sebagai masjid (Suhartono 2020).

Konteks politik domestik turut memperkuat arah kebijakan ini. Setelah kegagalan kudeta pada 2016, Presiden Erdoğan mempertegas narasi nasionalisme

Islam. Doa-doa Islam kembali diperdengarkan di Ayasofya dan Kariye, menandakan upaya simbolis untuk menegaskan identitas Islam Turki (Kuru 2020). Retorika Erdoğan mengenai Ayasofya semakin sering muncul dalam pidato politiknya, hingga pada 10 Juli 2020 Dewan Negara membatalkan keputusan 1934 yang menjadikan Ayasofya museum (Daniştay 2020). Segera setelah itu, Erdoğan mengesahkan dekrit presiden yang meresmikan kembali Ayasofya sebagai masjid pada 24 Juli 2020 (Özkan 2020).

Peristiwa serupa terjadi pada Kariye. Pada 2019, pengadilan membatalkan keputusan 1945 yang mengubahnya menjadi museum, dan setahun kemudian Erdoğan menandatangani keputusan resmi untuk menjadikannya masjid kembali (Sariyuce and Reynolds 2020; hurriyetdailynews 2020). Kedua langkah ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak internasional. UNESCO menilai perubahan fungsi situs tanpa konsultasi merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Warisan Dunia 1972 (Barak 2020; Dewanda 2020). Uni Eropa melalui Josep Borrell menyatakan keprihatinan mendalam, sementara Yunani menyebut langkah tersebut sebagai provokasi terhadap dunia Kristen Ortodoks (Utomo 2020). Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menegaskan bahwa Ayasofya seharusnya tetap menjadi simbol lintas agama (Pompeo 2020).

Namun, reaksi domestik sangat berbeda. Kelompok Islamis dan nasionalis menyambutnya sebagai kemenangan simbolik atas sekularisme Atatürk dan kebangkitan kembali identitas Ottoman (Mujahidin 2022, 185; Tyas, Albayumi, and Molasy 2022, 112). Dengan demikian, transformasi Ayasofya dan Kariye pada 2020 tidak hanya mencerminkan kebijakan internal Turki, tetapi juga membuka babak baru dalam diplomasi warisan budaya global, di mana situs

bersejarah menjadi arena perebutan makna antara nilai domestik dan nilai universal (Winter 2015, 1000; Todorović 2022, 857).

Tabel 3. Respon Internasional terhadap Transformasi Ayasofya dan Kariye (2020)

Kategori	Aktor/Negara/Organisasi	Posisi/Pernyataan
Pro	Pakistan	Menyatakan keputusan merupakan urusan internal Turki dan harus dihormati
	Malaysia (Mahathir Mohammad)	Menyebut konversi sebagai “restorasi keadilan sejarah” karena Ayasofya awalnya masjid
	Kelompok Islamis dan Nasionalis Turki	Menganggap sebagai kemenangan simbolik atas sekularisme Ataturk
Kontra	Amerika Serikat (Mike Pompeo)	Menganggap Ayasofya seharusnya tetap simbol kerukunan lintas agama
	Uni Eropa (Josep Borrell)	Menilai keputusan sangat disesalkan dan menghambat dialog anatarbudaya
	Prancis (Emanuel Macron)	Menyebut langkah Turki sebagai Provokasi politik
	Jerman (Heiko Mass)	Menilai konversi tantangan baru dalam hubungan bilateral
	Yunani	Menyebut sebagai Provokasi terhadap Dunia Kristen Ortodoks
	Gereja Ortodoks Rusia (Patriark Kirill)	Menyebut keputusan sebagai ancaman bagi peradaban kristen
	Patriark Ekumenis Bartholomew I	Menilai keputusan merusak simbol perdamaian lintas agama
	Paus Fransiskus	Mengaku “sangat terpukul” atas keputusan konversi
	UNESCO	Menilai keputusan mengancam nilai

		universal luar biasa situs warisan dunia
Netral/Ambivalen	Rusia (Kremlin/Dmitry Peskov)	Menganggap Urusan Internasl Turki, tetapi berharap nilai spiritual tetap dihormati
	Mesir	Melihat Konversi lebih sebagai strategi politik domestik Erdogan
	Arab Saudi dan UEA	Tidak menolak secara terbuka, memilih sikap hati-hati
	Organisasi Kerjasama Islam (OKI)	Tidak mengeluarkan pernyataan resmi, namun mencerminkan perbedaan pandangan internal.

Sumber: diolah penulis dari Jazeera (2020); Pompeo (2020); Kuru (2020, 210); Borrell (2020); Mursila (2020); Maas (2020); Utomo (2020); Pramudyani (2020, 56); Suryarandika (2020); Vatikan News (2020); Barak (2020); Dewanda (2020); TASS (2020); Tempo (2020); Najib (2020, 88).

3.2.1 Reaksi Negara-Negara Barat

Keputusan pemerintah Turki pada Juli 2020 untuk mengubah status Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid memicu reaksi keras dari negara-negara Barat. Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyatakan bahwa situs tersebut seharusnya tetap menjadi simbol kerukunan lintas agama dan memperingatkan potensi ketegangan antarumat beragama (Pompeo 2020). Analisis Cagaptay menunjukkan bahwa langkah Erdoğan merupakan strategi domestik berisiko tinggi karena mengabaikan sensitivitas multikulturalisme yang melekat pada status museum Ayasofya (Cagaptay 2020, 142). Uni Eropa juga menunjukkan penolakan, di mana Josep Borrell menyebut

keputusan tersebut sangat disesalkan (Borrell 2020). Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai kebijakan itu sebagai provokasi politik yang memperlebar jurang diplomatik antara Turki dan Eropa (Mursila 2020), sementara Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menilainya sebagai tantangan baru bagi hubungan bilateral Turki-Uni Eropa (Maas 2020). Yunani menyebut konversi itu sebagai provokasi terbuka terhadap dunia Kristen Ortodoks (Utomo 2020), sedangkan Rusia, meski menyatakan ini urusan internal Turki, tetap menekankan nilai spiritual Ayasofya bagi komunitas Ortodoks (TASS 2020).

3.2.2 Respon UNESCO

UNESCO sebagai badan PBB yang mengawasi warisan budaya dunia menyatakan keprihatinan atas langkah Turki yang mengubah status Ayasofya dan Kariye tanpa konsultasi. Direktur Jenderal Audrey Azoulay menegaskan bahwa setiap perubahan pada situs Warisan Dunia harus melalui diskusi internasional sesuai Konvensi 1972 (Barak 2020). Organisasi ini menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan nilai universal luar biasa (*Outstanding Universal Value*) dari kedua situs dan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan warisan dunia. Hal yang sama berlaku pada Kariye, di mana UNESCO menekankan pentingnya konsultasi internasional sebelum statusnya diubah, mengingat nilai pluralisme yang terkandung di dalamnya. Absennya dialog internasional dipandang sebagai pengabaian prinsip integritas warisan budaya global (Dewanda 2020).

3.2.3 Reaksi dari Gereja Ortodoks dan Vatikan

Pemimpin Gereja Ortodoks memberikan reaksi keras terhadap konversi Ayasofya. Patriark Bartholomew I menilai bahwa keputusan ini dapat memperburuk hubungan antara komunitas Kristen dan Muslim, serta merusak simbol perdamaian yang seharusnya melampaui kepentingan politik (Suryarandika 2020). Patriark Moskow Kirill menyebut perubahan status Ayasofya sebagai ancaman bagi peradaban Kristen, menandakan dimensi politik dan spiritual dalam respon Rusia (Pramudyani 2020, 56). Sementara itu, Paus Fransiskus menyampaikan keprihatinannya dengan menyatakan dirinya “sangat terpukul” atas keputusan tersebut, meski tanpa kecaman langsung, mencerminkan pendekatan hati-hati Vatikan dalam menjaga hubungan dengan dunia Islam (Vatikan News 2020).

3.2.4 Sikap Negara-Negara Muslim

Respon dunia Muslim terhadap keputusan Turki sangat beragam. Pakistan dan Malaysia memberikan dukungan penuh dengan alasan kedaulatan nasional, di mana Mahathir Mohamad menyebut keputusan tersebut sebagai “restorasi keadilan sejarah” karena Ayasofya memang awalnya masjid sebelum dijadikan museum oleh Atatürk (Jazeera 2020). Sebaliknya, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab lebih berhati-hati atau bahkan kritis, menilai langkah Erdoğan lebih sebagai strategi politik domestik daripada sekadar persoalan keagamaan (Tempo 2020). Perbedaan sikap ini juga terlihat pada Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang tidak mengeluarkan pernyataan resmi, menunjukkan keragaman pandangan negara-negara Muslim. Hal ini menegaskan bahwa konversi Ayasofya tidak hanya

menjadi isu internal Turki, tetapi juga berdampak pada geopolitik dunia Islam (Najib 2020, 88).

3.3 Aktor dan Implikasi

Transformasi status Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid pada tahun 2020 telah menempatkan dua situs bersejarah ini tidak hanya sebagai persoalan domestik Turki, tetapi juga sebagai isu internasional yang menyangkut diplomasi warisan budaya. Keputusan tersebut melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Bagi Turki, terutama pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya dan Kariye dijadikan instrumen simbolis untuk menegaskan kedaulatan politik dan identitas Islam. Namun, bagi aktor internasional seperti UNESCO, Uni Eropa, Amerika Serikat, hingga Gereja Ortodoks, kedua situs ini dipandang sebagai warisan bersama yang harus dijaga nilai universalnya. Ketegangan antara kepentingan domestik dan internasional inilah yang memperlihatkan peran penting aktor dalam membentuk arah diplomasi heritage Turki (Winter 2015, 1002).

3.3.1 Actor

Aktor utama dalam transformasi Ayasofya dan Kariye adalah pemerintah Turki, khususnya Presiden Erdoğan. Sejak awal dekade 2010-an, Erdoğan menggunakan retorika politik yang menekankan kejayaan Ottoman dan identitas Islam sebagai bagian dari agenda domestik dan kebijakan luar negeri. Dalam pidato-pidatonya, ia menegaskan bahwa mengembalikan Ayasofya sebagai masjid merupakan langkah untuk menghapus warisan sekularisme Atatürk, sekaligus

membangkitkan kebanggaan sejarah Islam Turki (Cagaptay 2020, 142). Peran negara di sini sangat dominan karena keputusan transformasi dilakukan melalui jalur hukum formal, yakni pembatalan dekret 1934 oleh Dewan Negara dan pengesahan dekret presiden pada 2020 (Sariyuce and Reynolds 2020).

Selain negara, terdapat aktor domestik non-negara yang berperan besar, seperti organisasi Islamis, kelompok masyarakat konservatif, dan partai-partai politik berhaluan agama. Mereka sejak lama melakukan kampanye, petisi, hingga aksi publik untuk menuntut Ayasofya dikembalikan sebagai masjid (Altinordu 2016, 35). Dalam konteks ini, peran kelompok masyarakat tidak bisa diabaikan karena mereka menjadi basis legitimasi politik bagi Erdoğan. Keberhasilan mengubah status Ayasofya dan Kariye menjadi masjid kemudian dipresentasikan pemerintah sebagai bentuk kemenangan aspirasi umat Muslim.

Aktor lain yang tak kalah penting adalah UNESCO. Sebagai lembaga internasional yang bertanggung jawab menjaga situs Warisan Dunia, UNESCO mengkritik keras keputusan sepihak pemerintah Turki karena tidak ada konsultasi terlebih dahulu. Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyatakan bahwa perubahan fungsi situs Warisan Dunia harus dibicarakan bersama komunitas internasional sesuai dengan Konvensi 1972 (Barak 2020). Sikap UNESCO menegaskan bahwa Ayasofya dan Kariye tidak hanya dimiliki oleh Turki, melainkan juga dianggap sebagai bagian dari *common heritage of humankind*.

Di sisi lain, aktor negara Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Yunani juga mengekspresikan keprihatinan mereka. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menilai bahwa Ayasofya harus tetap menjadi simbol kerukunan lintas agama (Pompeo 2020). Uni Eropa melalui Josep Borrell menyebut

keputusan Turki sebagai langkah yang disesalkan karena dapat merusak dialog antarbudaya (Borrell 2020). Yunani bahkan menganggap konversi tersebut sebagai provokasi terbuka terhadap dunia Kristen Ortodoks (Utomo 2020). Pandangan mereka menunjukkan bahwa Ayasofya tidak hanya sekadar bangunan, melainkan juga simbol peradaban dan identitas lintas agama.

Sementara itu, aktor keagamaan seperti Gereja Ortodoks Rusia dan Vatikan juga turut bersuara. Patriark Bartholomew I menilai konversi Ayasofya dapat memperburuk hubungan antaragama dan mencederai perasaan umat Kristen Ortodoks (Suryarandika 2020). Patriark Kirill dari Rusia bahkan menyebutnya sebagai ancaman bagi peradaban Kristen (Vatikan News 2020). Respon dari otoritas keagamaan ini memperlihatkan bahwa isu heritage tidak bisa dilepaskan dari sensitivitas spiritual dan religius.

Adapun dari dunia Muslim, respon aktornya lebih beragam. Negara seperti Pakistan dan Malaysia mendukung penuh keputusan Turki dengan alasan kedaulatan nasional dan keadilan sejarah (Jazeera 2020). Namun, negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab lebih berhati-hati bahkan menolak secara implisit, terutama karena faktor rivalitas geopolitik dengan Turki (Tempo 2020). Dengan demikian, terlihat bahwa aktor-aktor dalam isu ini memiliki kepentingan politik, religius, hingga strategis yang berlapis.

3.3.2 Concreate Goal

Tujuan konkret dari kebijakan transformasi Ayasofya dan Kariye adalah mengembalikan fungsi keduanya sebagai masjid. Pemerintah Turki menempuh jalur hukum dengan membatalkan dekrit yang menjadikan situs tersebut sebagai

museum dan segera mengeluarkan dekrit presiden yang meresmikan status baru. Pada 24 Juli 2020, shalat Jumat pertama kembali digelar di Ayasofya setelah 86 tahun, disusul keputusan serupa untuk Kariye pada Agustus 2020 (Sariyuce and Reynolds 2020).

Bagi pemerintah Turki, langkah ini dimaksudkan sebagai pemenuhan aspirasi publik. Kelompok Islamis dan partai konservatif selama bertahun-tahun menekan pemerintah agar mengembalikan situs ini ke fungsi awalnya sebagai masjid. Dengan melaksanakan tuntutan tersebut, Erdoğan tidak hanya menguatkan legitimasi politiknya, tetapi juga memosisikan diri sebagai pemimpin yang mampu merealisasikan simbol-simbol identitas Islam (Kuru 2020, 210). Dari perspektif domestik, tujuan konkret lain adalah memperkuat narasi sejarah Ottoman. Pemerintah Turki gencar melakukan renovasi masjid-masjid bersejarah dan monumen Ottoman, menjadikan Ayasofya dan Kariye sebagai ikon utama warisan kejayaan Islam. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk *counter-narrative* terhadap warisan sekularisme Atatürk yang memosisikan situs tersebut sebagai museum universal (Altinordu 2016, 38).

Bagi aktor internasional seperti UNESCO, tujuan konkret mereka justru sebaliknya, yakni menjaga status internasional Ayasofya dan Kariye sebagai warisan dunia. UNESCO menuntut agar Turki tetap menjamin akses publik global dan melindungi nilai sejarah yang mewakili pluralisme (Dewanda 2020). Negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menekankan bahwa tujuan konkret mereka adalah mencegah potensi konflik antaragama yang dapat muncul akibat perubahan status ini (Cagaptay 2020, 145).

3.3.3 General Goal

Jika tujuan konkret lebih terkait dengan langkah praktis, maka tujuan umum dari transformasi ini lebih bersifat strategis dan jangka panjang. Dari sisi pemerintah Turki, tujuan umum adalah menegaskan identitas Islam nasional dan memproyeksikan Turki sebagai pemimpin dunia Muslim. Dengan mengembalikan Ayasofya dan Kariye menjadi masjid, Erdoğan mengirimkan pesan bahwa Turki berdaulat penuh dalam menentukan warisan budayanya tanpa intervensi pihak luar (Cagaptay 2020, 147). Hal ini juga menjadi bagian dari strategi soft power Turki untuk memperkuat citra globalnya melalui simbol warisan budaya (Winter 2015, 1004).

Di tingkat domestik, tujuan umum kelompok konservatif adalah menghidupkan kembali ingatan kejayaan Ottoman sebagai fondasi identitas bangsa modern. Bagi mereka, Ayasofya bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi simbol kemenangan Islam atas sekularisme. Dengan demikian, tujuan umum transformasi adalah mengembalikan legitimasi religius dan politik yang berakar pada sejarah Ottoman (Altinordu 2016, 39).

Bagi UNESCO dan aktor internasional lain, tujuan umum mereka adalah menjaga warisan dunia sebagai milik bersama umat manusia. Prinsip *common heritage of humankind* menekankan bahwa situs bersejarah harus dilestarikan melampaui kepentingan domestik. Karena itu, UNESCO menilai keputusan Turki dapat melemahkan prinsip internasional tentang pelestarian heritage (Barak 2020). Di sisi lain, bagi negara-negara Barat, tujuan umum adalah menjaga pluralisme dan dialog antaragama. Ayasofya dianggap simbol pertemuan peradaban Kristen dan Islam, sehingga status museum selama puluhan tahun dipandang sebagai

kompromi terbaik untuk menghormati keberagaman (Pompeo 2020; Borrell 2020). Reaksi keras dari Yunani dan Gereja Ortodoks juga memperlihatkan bahwa tujuan umum mereka adalah melindungi identitas religius yang melekat pada Ayasofya (Suryarandika 2020).

3.4 Ayasofya dan Kariye sebagai *Heritage as Diplomacy*

Dalam kerangka teori Miloš Todorović (2022) dan Tim Winter (2015), warisan budaya dapat berfungsi sebagai *heritage as diplomacy*, yakni ketika heritage dipakai secara aktif sebagai pembawa pesan diplomatik (*carrier of diplomatic relations*). Kasus transformasi Ayasofya dan Kariye pada tahun 2020 menunjukkan bagaimana situs bersejarah dimanfaatkan tidak hanya sebagai simbol domestik identitas keislaman, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi politik Turki di panggung internasional. Melalui heritage diplomacy, pemerintah Erdoğan mengartikulasikan narasi kedaulatan, meneguhkan legitimasi politik, serta membangun pengaruh global berbasis soft power. Untuk memperjelas analisis, berikut disajikan tabel mengenai peran Ayasofya dan Kariye dalam kerangka *heritage as diplomacy*.

Tabel 4. Analisis *Heritage in and as Diplomacy: A Practice-Based Study* (Todorović 2022).

<i>Heritage Diplomacy</i>		
<i>Classification</i>	<i>As diplomacy</i>	<i>Analisis</i>
<i>The role of heritage</i>	<i>Heritage as a carrier of diplomatic relations</i>	<i>Heritage as a carrier of diplomatic relations: Ayasofya dan Kariye dipakai sebagai simbol diplomasi kedaulatan budaya dan agama Turki, sekaligus jembatan komunikasi antara Turki dengan</i>

		komunitas internasional.
<i>Example</i>	<i>Using your heritage abroad, using shared heritage between nations, etc.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi Ayasofya menjadi masjid (2020) sebagai simbol kebangkitan identitas Islam dan penegasan kedaulatan Turki. • Konversi Kariye menjadi masjid (2020) sebagai penguatan narasi konsistensi politik neo-Ottomanisme.
<i>Actor</i>	<i>A country and/or international and intergovernmental organisations</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Negara Turki (Presiden Erdoğan, Partai AKP, Direktorat Jenderal Wakaf/Diyanet). • Organisasi internasional: UNESCO, Uni Eropa, Dewan Gereja Dunia. • Aktor domestik: kelompok Islamis, nasionalis, dan masyarakat sipil Turki.
<i>The concrete goal of the country</i>	<i>Promoting cooperation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengonsolidasikan legitimasi politik domestik berbasis identitas Islam. • Menunjukkan independensi Turki dari tekanan eksternal. • Memperkuat solidaritas dengan negara-negara Muslim (Pakistan, Iran, Malaysia mendukung).
<i>The general goal of the country Source of soft power</i>	<i>Culture, Specifically, Shared history between countries</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menegaskan Turki sebagai pewaris sah peradaban Ottoman dan pemimpin dunia Islam. • Menggunakan warisan budaya sebagai sumber soft power melalui narasi sejarah, identitas religius, dan universalitas budaya. • Memperkuat citra internasional sebagai negara berdaulat yang menjaga nilai budaya sekaligus modern (pariwisata, keterbukaan situs).

		<ul style="list-style-type: none"> • Culture & shared history: narasi kejayaan Ottoman, simbol Islam global, dan status warisan dunia UNESCO. • Religion: penggunaan masjid sebagai simbol spiritual global. • Identity politics: resistensi terhadap sekularisme Barat, proyeksi Turki sebagai kekuatan alternatif dalam politik global.
--	--	--

Sumber: Disusun penulis berdasarkan Miloš Todorović, “Heritage Diplomacy: Conceptual Framework and Case Studies,” *International Journal of Heritage Studies* 28, no. 7 (2022): 850–860; Tim Winter, “Heritage Diplomacy,” *International Journal of Heritage Studies* 21, no. 10 (2015): 997–1015; Lerna K. Yanik and Jelena Subotic, “Cultural Heritage as Status Seeking: The International Politics of Turkey’s Restoration Wave,” *International Affairs* 97, no. 2 (2021): 389–408; serta sumber data penelitian penulis.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari persoalan transformasi Ayasofya dan Kariye dari museum menjadi masjid pada tahun 2020 di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan, yang menimbulkan kontroversi baik di tingkat domestik maupun internasional. Fenomena ini memperlihatkan ketegangan antara kedaulatan nasional Turki dengan komitmen global terhadap pelestarian warisan budaya dunia. Dalam kerangka diplomasi warisan budaya (*heritage diplomacy*), kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana warisan budaya tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai instrumen politik dan diplomasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ayasofya dan Kariye digunakan oleh pemerintah Turki sebagai *carrier* identitas nasional, yang menegaskan kembali narasi kejayaan Ottoman sekaligus memperkuat legitimasi politik Erdoğan di hadapan publik domestik. Di tingkat internasional, keduanya diproyeksikan sebagai simbol kedaulatan budaya yang menantang dominasi wacana sekularisme Barat. Respons global yang beragam—dukungan dari negara-negara Muslim dan kritik dari Barat serta UNESCO—mencerminkan peran *heritage* sebagai medium diplomasi, komunikasi, sekaligus kontestasi normatif dalam hubungan internasional.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan orisinalitasnya dalam menganalisis transformasi Ayasofya dan Kariye melalui perspektif *heritage diplomacy* ala Winter dan Todorović. Temuan utama menggarisbawahi bahwa kebijakan Erdoğan tidak sekadar simbolisme religius, melainkan strategi diplomasi budaya yang kompleks: memperkuat identitas domestik, membangun

soft power di dunia Islam, serta menegosiasikan posisi Turki dalam percaturan global.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada aspek politik dan diplomasi, tanpa membahas secara mendalam dimensi ekonomi, pariwisata, maupun sosial keagamaan dari transformasi Ayasofya dan Kariye. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap sektor ekonomi kreatif, hubungan antaragama, serta dinamika pariwisata budaya Turki.

Bagi pemerintah Turki, rekomendasi yang dapat diajukan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara klaim kedaulatan nasional dan komitmen terhadap pelestarian nilai universal warisan budaya. Langkah seperti memastikan akses publik lintas agama, merawat mosaik Bizantium, serta melibatkan UNESCO dalam dialog terbuka akan memperkuat citra Turki sebagai negara yang mampu mengelola warisan budaya secara inklusif dan bertanggung jawab.

Selain itu, bagi masyarakat internasional dan komunitas global, transformasi Ayasofya dan Kariye hendaknya dipandang bukan semata-mata sebagai konflik identitas, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun dialog lintas budaya dan agama. Dengan menjadikan heritage sebagai jembatan, bukan sekadar simbol perbedaan, komunitas internasional dapat memperkuat nilai bersama dalam kerangka diplomasi budaya yang lebih konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Altinordu, Ateş. 2016. "Denial of Violence: Ottoman Past, Turkish Present, and Collective Violence against the Armenians, 1789–2009." *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* 45 (3): 309–11. <https://doi.org/10.1177/0094306116641407r>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Bahçeci, Barış, and Serkan Yolcu. 2022. "Transforming the Judiciary into the Proxies of The Rulers: The Hagia Sophia Case." *Annales de La Faculté de Droit d'Istanbul* 0 (0): 0–0. <https://doi.org/10.26650/Annales.2022.71.0008>.
- Cakir, Ferit. 2022. "Structural Performance Evaluation of Reconstructed Masonry Structure: A Case of Ephesus Celsus Library in Turkey." *Journal on Computing and Cultural Heritage* 15 (4). <https://doi.org/10.1145/3517339>.
- Cesari, Chiara De. 2010. "World Heritage and Mosaic Universalism: A View from Palestine." *Journal of Social Archaeology* 10 (3): 299–324. <https://doi.org/10.1177/1469605310378336>.
- Coruhlu, Yakup Emre, Bayram Uzun, and Okan Yildiz. 2020. "Conflict over the Use of Hagia Sophia: The Legal Case." *Land* 9 (10). <https://doi.org/10.3390/LAND9100350>.
- Daniştay, Onuncu Daire. 2020. "The Hagia Sophia Case." *Harvard Law Review*. 2020. <https://harvardlawreview.org/print/vol-134/the-hagia-sophia-case/>.

- Daties, Dyah R. A. 2021. "Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan Dunia 1972." *Sasi* 23 (1): 13.
- Donelli, Federico. 2019. "Persuading through Culture, Values, and Ideas: The Case of Turkey's Cultural Diplomacy." *Insight Turkey* 21 (3): 113–34. <https://doi.org/10.25253/99.2019EV.04>.
- Filipović, Emir O. 2022. "M. Hakan Yavuz, Nostalgia for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism. Oxford University Press, 2020, 337 Pages." *Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Art, Archeology) / Radovi (Historija, Historija Umjetnosti, Arheologija), ISSN 2303-6974 on-Line 8 (8): 264–66.* <https://doi.org/10.46352/23036974.2021.264>.
- Goodyear, Michael P. 2022. "Heaven or Earth: The Hagia Sophia Re-Conversion, Turkish and International Law, and the Special Case of Universal Religious Sites." *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law* 19 (1). <https://doi.org/10.5070/n419156052>.
- Hisarlioğlu, Fulya, Chara Karagiannopoulou, and Lerna K. Yanik. 2024. "Identity, Cultural Heritage and the Politics of Sovereignty: Narrating Turkey and Greece Through Ayasofya." *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*. <https://doi.org/10.1080/19448953.2024.2318675>.
- Kıran, Yavuz Selim. 2020. "Hagia Sophia: Symbol of Peace and Diversity." *Insight Turkey* 22 (Summer 2020): 67–73. <https://doi.org/10.25253/99.2020223.05>.
- Muhammad, Luthvi Nur, Mahfud Wahyudi, and Robi'atul Nimas Nadia. 2020. "Turki, Hagia Sophia Dan Kebangkitan Politik Islam: Membaca Fenomena

- Peralihan Museum Bersejarah Menjadi Masjid.” *LoroNG* 9 (2): 107–22.
- Mujahidin, Saekul. 2022. “The Politics of the Transition of the Hagia Sophia to a Mosque by President Recep Tayyip Erdogan.” *Politea* 5 (2): 182. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i2.15321>.
- Niemiec, Jan. 2024. “Preserving Common Ties : Turkey ’ s Public Diplomacy in Central Asia Preserving Common Ties : Turkey ’ s Public Diplomacy in Central Asia,” no. October. <https://doi.org/10.17951/bc.2024.9.241-262>.
- Rahmatika, Laily, Rani Setiawaty, and Agus Budi Wahyudi. 2021. “Netizens on Hagia Sophia’s Conversion Policy: A Critical Discourse Analysis.” *Journal of Humanities and Social Sciences Research* 3 (2): 195–208. <https://doi.org/10.37534/bp.jhssr.2021.v3.n2.id11118.p195>.
- Reed, Howard A. 1957. “Secularism and Islam in Turkish Politics.” *Current History* 32 (190): 333–38. <https://doi.org/10.1525/curh.1957.32.190.333>.
- Richard Blackburn. 1996. “Review Reviewed Work (s): Between Two Worlds : The Construction of the Ottoman State by Cemal Kafadar Review by : Richard Blackburn Source : The International History Review , Nov . , 1996 , Vol . 18 , No . 4 (Nov . , 1996), Pp .” 18 (4): 18–21.
- Sampson M. Nathanailidis. 2021. “THE POLITICAL RISK OF CONVERTING HAGIA SOPHIA BACK INTO A MOSQUE IN THE YEAR 2020” 9 (2): 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.37745/gjpsa.2013>.
- Sözen, Yunus. 2020. “Popular Will against Democracy: Populist Autocratization in Turkey.” *Istanbul Bilgi University* 1 (1): 9–29. <https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.3>.
- Sujati, Budi, and Wahyu Iryana. 2020. “Transformasi Museum Hagia Sophia Oleh

- Erdogan Perspektif Sejarah Dan Implikasinya Bagi Indonesia.” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6 (2): 277–90.
<https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.2690>.
- Todorović, Miloš. 2022. “Heritage in and as Diplomacy: A Practice Based Study.” *International Journal of Heritage Studies* 28 (7): 849–64.
<https://doi.org/10.1080/13527258.2022.2091637>.
- Tyas, Tri Restuning, Fuat Albayumi, and Honest Dody Molasy. 2022. “PENGUATAN POLITIK ISLAM TURKI PENGUBAHAN STATUS HAGIA SOPHIA Tri Restuning Tyas , Fuat Albayumi , Honest Dody Molasy.” *Jurnal Review Politik* 12 (1): 93–123.
- Winter, Tim. 2015. “Heritage Diplomacy.” *International Journal of Heritage Studies* 21 (10): 997–1015. <https://doi.org/10.1080/13527258.2015.1041412>.
- Yanık, Lerna K. 2020. “Cultural Heritage as Status Seeking : The International Politics of Turkey ’ s Restoration Wave.”
<https://doi.org/10.1177/0010836720970242>.
- Yilmaz, Ihsan. 2024. “Digital Authoritarianism and Religious Populism in Turkey.” *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4675433>.
- Yousaf, Abida, and Fozia Bibi. 2021. “The Power Projection of Turkey in Middle East: (From 2000-2020).” *Global Foreign Policies Review* IV (I): 12–22.
[https://doi.org/10.31703/gfpr.2021\(iv-i\).02](https://doi.org/10.31703/gfpr.2021(iv-i).02).

Media/News

- Ahmet Kuru. 2020. “Hagia Sophia, Islamism, and Secularism in Turkey.”
 Berkleycenter.Georgetown.Edu. 2020.

<https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/hagia-sophia-islamism-and-secularism-in-turkey>.

Anadolu Ajansı. 2015. "First Quran Recitation in Hagia Sophia in 85 Years."

Aa.Com.Tr. 2015. <https://www.aa.com.tr/en/turkey/first-quran-recitation-in-hagia-sophia-in-85-years/58605>.

Anton Suhartono. 2020. "Sejarah Chora Kariye, Bangunan Bekas Gereja Yang Diubah Kembali Jadi Masjid Oleh Erdogan." *INews.Id*, 2020. <https://www.inews.id/news/internasional/sejarah-chora-kariye-bangunan-bekas-gereja-yang-diubah-kembali-jadi-masjid-oleh-erdogan>.

Ayla Jean Yackley. 2019. "Erdogan Says Museum and Former Cathedral Hagia Sophia Will Become a Mosque Again." *Theartnewspaper.Com*. 2019. <https://www.theartnewspaper.com/2019/03/29/erdogan-says-museum-and-former-cathedral-hagia-sophia-will-become-a-mosque-again?>

Bahçeci, Barış, and Serkan Yolcu. 2022. "Transforming the Judiciary into the Proxies of The Rulers: The Hagia Sophia Case." *Annales de La Faculté de Droit d'Istanbul* 0 (0): 0–0. <https://doi.org/10.26650/Annales.2022.71.0008>.

Berk Özkan. 2020. "Danıştay 10. Dairesinin 'Ayasofya' Kararı Sevinçle Karşılandı." *Aa.Com.Tr*. 2020. <https://www.aa.com.tr/tr/ayasofya-camii/danistay-10-dairesinin-ayasofya-karari-sevincele-karsilandi/>.

Billy Dewanda. 2020. "Hagia Sophia Jadi Masjid, UNESCO Sesalkan Keputusannya." *USS FEED*. 2020. <https://ussfeed.com/hagia-sophia-jadi-masjid-unesco-sesalkan-keputusannya/pop-culture/>.

Blaise Misztal. 2020. "Erdogan's Hagia Sophia Speech." *Medium*. 2020. <https://medium.com/%40blaise.misztal/erdogans-hagia-sophia-speech->

english-translation-64595c28a764.

citizens of the Kocaeli province. 2013. "Petition to Turn Hagia Sophia into a Mosque." Archaeology Wiki. 2013. <https://www.archaeology.wiki/blog/2013/02/06/petition-to-turn-hagia-sophia-into-a-mosque/>.

Coruhlu, Yakup Emre, Bayram Uzun, and Okan Yildiz. 2020. "Conflict over the Use of Hagia Sophia: The Legal Case." *Land* 9 (10). <https://doi.org/10.3390/LAND9100350>.

Dea Alvi Soraya. 2020. "Usai Hagia Sophia Lalu Kariye, Ada Apa Dengan Turki Erdogan?" Khazanah.Republika.Co.Id. 2020. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qfx5ue320/usai-hagia-sophia-lalu-kariye-ada-apa-dengan-turki-erdogan?>

Directorate of Communications. 2020. "President Erdoğan: 'Hagia Sophia, the Shared Heritage of Humanity, Will Continue to Embrace All with Its New Status in a Much More Sincere Way.'" Presidency of The Republic of Turkiye Directorate of Communications. 2020. <https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/president-erdogan-hagia-sophia-the-shared-heritage-of-humanity-will-continue-to-embrace-all-with-its-new-status-in-a-much-more-sincere-way>.

Doğan News Agency. 2013. "Turkish Deputy PM Expresses 'Hope' to See Hagia Sophia as Mosque." Hurriyetdailynews.Com. 2013. <https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-deputy-pm-expresses-hope-to-see-hagia-sophia-as-mosque-57998>.

Erder & Cevat. 2016. *The World Heritage Convention as Reflected in Turkey*.

- UNESCO*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247065>.
- Faisal Mursila. 2020. "Kritik Pernyataan 'Anti Islam' Emanuel Macron, Erdogan: Siapa Anda, Berbicara Seperti Itu Mengenai Tatanan Islam?" Masyarakat.Net. 2020. <https://masyarakat.net/kritik-pernyataan-anti-islam-emanuel-macron-erdogan-siapa-anda-berbicara-seperti-itu-mengenai-tatanan-islam#!>
- "First Muslim Prayers Held in Hagia Sophia after 85 Years." 2020. Hurriyetdailynews.Com. 2020. <https://www.hurriyetdailynews.com/first-friday-prayers-held-in-hagia-sophia-after-mosque-reconversion-156812>.
- Hariz Barak. 2020. "UNESCO, Dewan Gereja Dunia Kritik Turki Ubah Hagia Sophia Jadi Masjid." Liputan6. 2020. <https://www.liputan6.com/global/read/4302961/unesco-dewan-gereja-dunia-kritik-turki-ubah-hagia-sophia-jadi-masjid?page=2>.
- Haryadi, Didid. 2020. "Politik Masjid Dari Era Utsmani Hingga Hagia Sophia Era Erdogan." Islami.Co. 2020. <https://islami.co/politik-masjid-dari-era-utsmani-hingga-hagia-sophia-era-erdogan/>.
- Heiko Maas. 2020. "Foreign Minister Heiko Maas on Hagia Sophia." Federal Foreign Office. 2020. <https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-hagia-sophia-2371190>.
- hurriyetdailynews. 2020. "Turkey Converts Kariye Museum into Mosque." Hurriyetdailynews.Com. 2020. <https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-converts-kariye-museum-into-mosque-157585>.
- Isil Sariyuce and Emma Reynolds. 2020. "Turkey's Erdogan Orders the Conversion of Hagia Sophia Back into a Mosque." CNN. 2020.

- <https://edition.cnn.com/2020/07/10/europe/hagia-sophia-mosque-turkey-intl>.
- Jazeera, Al. 2020. "Turkey's Erdogan Visits Hagia Sophia after Reconversion to Mosque." Al Jazeera. 2020. <https://www.aljazeera.com/features/2020/7/19/turkeys-erdogan-visits-hagia-sophia-after-reconversion-to-mosque>.
- Josep Borrell. 2020. "Turkey: Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell on the Decision Regarding Hagia Sophia." EUROPEAN UNION WEBSITES. 2020. https://www.eeas.europa.eu/eeas/turkey-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-decision-regarding-hagia-sophia_en.
- Louis Fishman. 2022. "Implications of the Conversion of Hagia Sophia into a Mosque, Inside and Outside Turkey." European Institute of the Mediterranean. 2022. <https://www.iemed.org/publication/implications-of-the-conversion-of-hagia-sophia-into-a-mosque-inside-and-outside-turkey/>.
- Maria Elisa the Hospitaller. 2018. "Türkiye Dominates UNESCO's Tentative List of World Heritage Sites." Anadolu Agency. 2018. <https://www.aa.com.tr/id/budaya/turki-mendominasi-daftar-tentatif-situs-warisan-dunia-unesco/>.
- Michael R. Pompeo. 2020. "The Status of the Hagia Sophia." US Department State. 2020. <https://2017-2021.state.gov/the-status-of-the-hagia-sophia/>.
- Muhammad Najib. 2020. "Dimensi Ideologis Di Balik Perubahan Status Hagia Sophia Menjadi Masjid." Rmol.Id. 2020. <https://rmol.id/read/2020/07/20/444418/dimensi-ideologis-di-balik-perubahan-status-hagia-sophia-menjadi-masjid>.

- Murat Padar. 2023. "The Importance of the Marmara Sea and Region for Turkey." Istanbulproperty. 2023. <https://istanbulproperty.com/blog/living-in-turkey/the-importance-of-the-marmara-sea-and-region-for-turkey>.
- . 2024. "Everything About Turkish Aegean Region." Istanbulproperty. 2024. <https://istanbulproperty.com/blog/living-in-turkey/everything-about-turkish-aegean-region>.
- Müze İstanbul. 2020. "KARİYE CAMİİ (CHORA MOSQUE)." 2020. KARİYE CAMİİ (CHORA MOSQUE).
- Niemiec, Jan. 2024. "Preserving Common Ties : Turkey ' s Public Diplomacy in Central Asia Preserving Common Ties : Turkey ' s Public Diplomacy in Central Asia," no. October. <https://doi.org/10.17951/bc.2024.9.241-262>.
- Our Istanbul Correspondent. 2013. "Hagia Sophia, Gezi Park Initiatives Reflect Bid to Put More Islamist Face on Turkey." Morningstarnews. 2013. <https://morningstarnews.org/2013/06/hagia-sophia-gezi-park-initiatives-reflect-bid-to-put-more-islamist-face-on-turkey/>.
- Rizky Suryarandika. 2020. "Alih Status Hagia Sophia Bisa Ganggu Relasi Islam-Kristen." Republika. 2020. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qcs360320/alih-status-hagia-sophia-bisa-ganggu-relasi-islamkristen>.
- Salim Çevik. 2020. "Political Implications of the Hagia Sophia Reconversion." Stiftung Wissenschaft Und Politik. 2020. <https://www.swp-berlin.org/publikation/political-implications-of-the-hagia-sophia-reconversion?>
- Soner Cagaptay. 2020. "Erdogan to Make Hagia Sophia a Mosque Again, But

- Will It Help Him?" The Washington Institute For Near East Policy. 2020. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/erdogan-make-hagia-sophia-mosque-again-will-it-help-him>.
- TASS. 2020. "Russia Regrets Turkey's Decision to Turn Hagia Sophia Museum into Mosque." TASS Russian News Agency. 2020. <https://tass.com/politics/1178125>.
- Tempo. 2020. "Manuver Politik Erdogan Melalui Alih Fungsi Hagia Sophia." Tempo.Co. 2020. https://www.tempo.co/arsip/manuver-politik-erdogan-melalui-alih-fungsi-hagia-sophia-601703?utm_source=chatgpt.com.
- The North Africa Journal. 2020. "Turkey Transforms Kariye Museum into Mosque." The North Africa Journal. 2020. <https://north-africa.com/turkey-transforms-kariye-museum-into-mosque/>.
- turkishminute.com. 2016. "Adhan Recited in İstanbul's Hagia Sophia after Decades Following Laylat Al Qadr." Turkishminute.Com. 2016. <https://www.turkishminute.com/2016/07/02/adhan-recited-hagia-sophia-decades-laylat-al-qadr>.
- UNESCO. n.d. "Historic Areas of Istanbul." <https://whc.unesco.org/en/list/356>.
- . n.d. "UNESCO. (1985). Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia." <https://whc.unesco.org/en/list/357/>.
- Utomo, Ardi Priyatno. 2020. "Hagia Sophia Jadi Masjid, Yunani Ancam Jadikan Rumah Mustafa Kemal Ataturk Museum Genosida." KOMPAS.Com. 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/13/143633570/hagia-sophia-jadi-masjid-yunani-ancam-jadikan-rumah-mustafa-kemal-ataturk>.
- Vatikan News. 2020. "Pope Francis: 'I Think of Hagia Sophia, and I Am Very

Saddened.”” Vatikan News. 2020.
<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-07/angelus-pope-remembers-seafarers.html>.

Yashinta Difa Pramudyani. 2020. “Pemimpin Gereja Rusia Keberatan Terkait Monumen Turki Dijadikan Masjid.” Antara News. 2020.
<https://sulteng.antaranews.com/berita/135942/pemimpin-gereja-rusia-keberatan-terkait-monumen-turki-dijadikan-masjid>.

Buku

Creswell, John W., and J. David Creswell. 2018. *Mixed Methods Procedures. Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M Ethods Approaches.*

Erder & Cevat. 2016. *The World Heritage Convention as Reflected in Turkey. UNESCO.*